

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PPH PASAL 21 BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Akuntansi Perpajakan*

Oleh:

ILLAL NURHABIBAH

NPM : 1620050031



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : **ILLAL NURHABIBAH**
NPM : 1620050031
PRODI : **MAGISTER AKUNTANSI**
KONSENTRASI : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
JUDUL TESIS : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPH PASAL 21
BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BINJAI**

Pengesahan Tesis :
Medan, 04 September 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPH PASAL 21 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk Oleh Magister Akuntansi PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam
Ujian, Pada Hari Sabtu , Tanggal 04 September 2020

Panitia Penguji

1. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Ketua

1.

2. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA

Sekretaris

2.

3. Dr. Irfan, S.E., M.M.

Anggota

3.

4. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Anggota

4.

5. Dr. Bastari M., S.E., M.M., BKP

Anggota

5.

PERNYATAAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPH PASAL 21 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan,

2020




Illal Nurhabibah
1620050031

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN PPH PASAL 21 BADAN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

**ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Menganalisis dan menguji pengaruh Jumlah Pemotong Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai. (2) Menganalisis dan menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai. (3) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai. (4) Menganalisis dan menguji pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai. (5) Menganalisis dan menguji pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data time series. Penelitian ini menggunakan data periode lima tahun terakhir yaitu periode tahun 2014-2019 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai dan KPP Pratama Kota Binjai. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jumlah Pemotong Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. (3) Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. (4) Jumlah Angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. (5) Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan.

Kata kunci : Jumlah Pemotong Pajak, Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Angkatan Kerja, Penerimaan PPh pasal 21 Badan

**ANALYSIS OF FACTORS THATS INFLUENCE THE
ACCEPTANCE OF PPH 21 AGENCY AT OFFICE
TAX SERVICE PRATAMA BINJAI**

**ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031**

ABSTRACT

This research was conducted to: (1) Analyze and test the effect of the Amount of Withholding Taxes on the Income Tax Article 21 in Agency at KPP Pratama Binjai. (2) Analyze and test the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the receipt of PPH Article 21 of the Agency at KPP Pratama Binjai. (3) Analyze and test the effect of Population on PPH Article 21 of the Agency at KPP Pratama Binjai. (4) Analyze and test the effect of the number of the workforce on the receipt of PPH Article 21 of Agency at KPP Pratama Binjai. (5) Analyze and test the effect The amount of Tax withholding, Gross Regional Domestic Product (GRDP), The number of population, and the number of the Work Force on the receipt of PPH Article 21 Agency. The type of data used in this study is secondary data and time series data. This study uses data from the past five years, namely the period 2014-2019 obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) of Binjai City and KPP Pratama Kota Binjai. Data were analyzed using multiple linear regression models. The results of the study show that: (1) The amount of tax withholding has a negative effect and not significant the income of PPH Article 21. (2) Gross Regional Domestic Product (GRDP) has a positive effect and significant on the receipt of PPH Article 21 Agency. (3) The number of Population has a positive effect and significant on the receipt of PPH article 21 Agency. (4) The number of the Work Force has a negative effect and significant on the receipt of PPH Article 21 Agency. (5) The amount of Tax Withholding, Gross Regional Domestic Product (GRDP), The number of population, and the number of the Work Force simultaneously affect on the receipt of PPH Article 21 Agency.

Keywords: Withholding Tax, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Population, Receipt PPH article 21 Agency

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang disusun sebagai kelengkapan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa Ayahanda dan Ibunda tercinta serta abang dan adik yang tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Widia Astuty, S.E, M.Si, QIA, Ak, CA, CPAI selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dan tidak bosan bosannya selalu mengingatkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Eka Nurmalasari, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak Dr. Bastari M., S.E., M.M., BKP Selaku pembimbing yang telah memberikan saran, arahan dan telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak/Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa/i khususnya peneliti.
8. Teman-Teman seperjuangan di MAKSI UMSU angkatan X yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis.

Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya.

Medan, Juli 2020

Peneliti

ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Deskripsi Teori.....	12
2.1.1 Pajak Penghasilan	12
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	19
2.1.3 Penduduk	24
2.1.4 Angkatan Kerja.....	31
2.1.5 Penerimaan Pajak Pasal 21	37
2.2 Kajian Penelitian Yang Relevan	39
2.3 Kerangka Konseptual	41
2.4 Hipotesis Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Pendekatan Penelitian	47
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	47
3.3 Populasi dan Sampel	49

3.4	Defenisi Operasional Variabel	49
3.4.1	Variabel Dependen.....	49
3.4.2	Variabel Independen	50
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Teknik Analisis Data	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1	Hasil Penelitian	62
4.1.1	Gambaran Umum KPP Pratama Binjai.....	62
4.1.2	Deskripsi Data.....	66
4.1.3	Analisis Statistik Deskriptif	76
4.1.4	Hasil Uji Asumsi Berganda.....	79
4.1.5	Analisis Regresi Berganda	85
4.1.6	Pengujian Hipotesis.....	88
4.2	Pembahasan.....	92
4.2.1	Pengaruh Jumlah Pemotong Pajak Terhadap Penerimaan PPh 21 badan.....	93
4.2.2	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan PPh 21 Badan	95
4.3	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap penerimaan PPh 21 Badan	97
4.4	Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Penerimaan PPh 21 Badan	98
BAB V	PENUTUP	103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan PPh 21 Badan	3
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel.....	51
Tabel 4.1	Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Dalam Periode Tahunan.....	67
Tabel 4.2	Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Dalam Periode Bulanan	67
Tabel 4.3	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai Dalam Periode Tahunan.....	69
Tabel 4.4	Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai Dalam Periode Bulanan.....	70
Tabel 4.5	Perkembangan PDRB Kota Binjai Dalam Periode Tahunan	72
Tabel 4.6	Perkembangan PDRB Kota Binjai Dalam Periode Bulanan	72
Tabel 4.7	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Dalam Periode Tahunan	73
Tabel 4.8	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Dalam Periode Bulanan.	
Tabel 4.9	Perkembangan Jumlah Pemotong Pajak Periode Bulanan.....	75
Tabel 4.10	Statistik Deskripsi	77
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas.....	80
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinearitas.....	81
Tabel 4.13	Hasil Uji Park.....	83
Tabel 4.14	Kriteria Penerimaan Model Bebas Autokorelasi.....	84
Tabel 4.15	Hasil Uji Autokorelasi Sebelum Cochrane Orcutt	84
Tabel 4.16	Hasil Uji Autokorelasi Setelah Cochrane Orcutt	85
Tabel 4.17	Analisis Regresi Berganda	86
Tabel 4.18	Hasil Uji t (Parsial).....	88
Tabel 4.19	Hasil Uji t (Parsial).....	91
Tabel 4.20	Hasil Analisis Koefisien Determinasi	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	45
Gambar 4.1	Grafik Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Dalam Periode Bulanan.....	68
Gambar 4.2	Scatterplot Model	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi atau iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Dwi Sunar Prasetyono, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar pajak, termasuk sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak badan mempunyai penghasilan dari beberapa sumber penghasilan. Pertama, dari usaha atau kerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto. Kedua, dari satu atau lebih pemberi kerja. Ketiga, yang dikenakan PPh Final atau bersifat final. Keempat dari penghasilan lainnya.

Pajak penghasilan pasal 21 yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk penerimaan berupa pembayaran berkala, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan melalui pemotong pajak dari penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi dalam negeri.

Menurut ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mardiasmo, 2011: 31). Prinsip *self assesment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk melaporkan penghitungan dan atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan.

Sama halnya dengan akuntansi, wajib pajak memiliki kewajiban dalam melakukan proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisarian suatu transaksi keuangan yang berkaitan langsung dengan pembayaran pajak atau dikenal dengan pengisian surat pemberitahuan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Proses penyusunan laporan bermanfaat untuk mempermudah wajib pajak pribadi, badan dalam melaporkan harta/kekayaan dan juga penghasilan yang diperoleh wajib pajak pribadi/badan pada periode tertentu.

Menurut Mentari Risdianti (2013:26), masalah yang ditemui adalah wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan masih kesulitan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT), masih banyak yang kurang memahami dan seringkali Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui oleh masyarakat, sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak terlambat dalam melaporkan SPT. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment*

menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yaitu berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Binjai. KPP Pratama kota Binjai beralamat di Jalan Jambi No. 1, Rambung Barat, Binjai. KPP Pratama Binjai bertugas secara langsung dalam mengawasi dan menangani pajak penghasilan di kota Binjai. Berdasarkan hasil pra survey di KPP Pratama Binjai dan Badan Pusat Statistik kota Binjai memiliki Penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penerimaan PPh 21 Badan

Bulan	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	7,948,880,0 06	5,670,255, 331	8,282,996, 192	9,865,193, 057	8,495,412, 747
2	5,899,913,0 61	4,443,757, 454	3,159,174, 145	5,138,434, 563	6,162,815, 163
3	7,299,519,5 13	4,873,927, 583	3,701,999, 611	5,102,099, 155	6,134,600, 067
4	11,896,218, 787	7,617,578, 314	9,342,714, 470	8,627,058, 401	8,184,186, 232
5	17,126,929, 232	7,304,168, 579	14,736,311 ,427	16,833,980 ,215	21,497,392 ,043
6	9,594,003,1	17,651,472	5,967,080,	13,118,688	11,148,144

	07	,672	718	,775	,755
7	24,995,321, 711	10,357,344 ,620	10,161,666 ,867	15,852,127 ,696	18,974,030 ,453
8	13,400,066, 129	18,516,704 ,885	15,541,711 ,061	8,798,270, 078	8,129,225, 980
9	6,588,788,7 26	4,906,334, 645	4,428,330, 835	8,360,039, 651	5,651,517, 547
10	7,814,910,1 26	5,577,104, 136	5,307,466, 147	7,826,580, 403	6,059,743, 216
11	15,044,978, 139	11,693,842 ,950	11,664,114 ,680	13,374,201 ,944	7,202,344, 333
12	20,144,890, 956	19,945,295 ,573	23,271,583 ,025	20,197,989 ,837	5,446,936, 773
TOTA	147,754,41	118,557,78	115,565,14	133,094,66	139,220,12
L	9,493	6,742	9,178	3,775	2,494
%		-19.76%	-2.52%	15.17%	-29.09%

Sumber : Data diolah (2019)

Dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1 laju pertumbuhan PPh 21 Badan kota Binjai dalam bentuk persentase dari Tahun 2015 sampai 2019 cenderung naik turun. Penurunan drastis pada tahun 2015 ke tahun 2016 mencapai -19.76%, untuk tahun 2017 ke tahun 2018 kota Binjai Growth 15.17% dan menurun sebesar 29.09% pada tahun 2019. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak

sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satu kebijakan pajak yang dimaksudkan untuk menunjang penerimaan negara adalah kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Rahayu, 2010). Setiap tahunnya jumlah wajib pajak akan bertambah sehingga pertambahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan kepada negara juga semakin bertambah. Secara tak langsung, penerimaan daerah (termasuk pajak) dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu variabel-variabel ekonomi makro.

Menurut Purwiyanto dan Tity Hernawati (2002: 71), tinggi rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan makro ekonomi seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk, investasi, dan angkatan kerja. Hal ini terjadi karena variabel-variabel tersebut selain menjadi asumsi penting dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi termasuk sektor penerimaan perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas kegiatan perekonomian.

Salah satu fenomena kegiatan ekonomi suatu daerah adalah faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita penduduk di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu daerah dengan

jumlah penduduk daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator umum yang digunakan pemerintah daerah dalam menentukan baik buruknya pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga diartikan sebagai balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Balas jasa faktor produksi yang dimaksud yaitu upah dan gaji, sewa lahan, bunga modal dan keuntungan. Hal ini berhubungan langsung dengan penerimaan PPh 21 dimana adanya upah dan gaji dimana sebelumnya dipotong pajak penghasilan. Sehingga dapat dikatakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga memacu penerimaan PPh pasal 21.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave (1989) besar kecilnya penerimaan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Jumlah penduduk di Kota Binjai sendiri mengalami peningkatan mulai tahun 2015 hingga tahun 2018. Menurut Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk kota binjai tahun 2015 sebesar 264.687 jiwa meningkat 267.901 jiwa pada tahun 2016. Serta meningkat pada tahun selanjutnya yakni sebesar 270.926 jiwa pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi sebesar 273.892 jiwa pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 271.251 jiwa. Dalam populasi penduduk yang besar terdapat penduduk usia produktif yang mampu menghasilkan barang atau jasa. Hal ini memacu adanya peningkatan penerimaan pajak terutama pajak

penghasilan (PPh pasal 21). Karena penduduk usia produktif akan memperoleh penghasilan, gaji atau upah atas barang atau jasa yang dihasilkan. Namun, peningkatan/pertambahan penduduk terutama usia produktif masih belum mampu untuk memacu tercapainya target pajak terutama penerimaan PPh 21. Hal ini dilihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak diimbangi dengan pertambahan penduduk.

Penduduk dengan usia 15 tahun ke atas dikategorikan sebagai angkatan kerja. Sama halnya dengan penduduk, angkatan kerja seharusnya menjadi obyek utama dalam penerimaan PPh pasal 21. Dilihat jumlah angkatan kerja di kota Medan selama periode 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 mengalami penurunan angkatan kerja dibandingkan tahun 2015. Namun pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan angkatan kerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mengalami penurunan angkatan kerja kembali pada tahun 2020. Sama halnya dengan penduduk, peningkatan angkatan kerja juga tidak sepenuhnya memberikan efek positif dalam penerimaan PPh pasal 21. Dilihat dari penduduk dalam usia produktif namun masih menempuh pendidikan yang mengakibatkan jumlah angkatan kerja berkurang. Selain itu, masalah utama yakni pengangguran dimana terjadi karena peningkatan angkatan kerja tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan baru. Adanya angkatan kerja menganggur dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak PPh pasal 21.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aprilia Dwi Pratiwi dalam penelitiannya pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Diprovinsi Lampung”. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya tersebut dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang dimaksud, antara lain variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya tidak memakai angkatan kerja sebagai variabel bebas sedangkan dalam penelitian ini ada penambahan variabel independen yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu jumlah pemotong pajak. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi penelitian di Kota Lampung, sedangkan dalam penelitian ini di Kota Binjai. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Binjai**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah yaitu:

1. Penerimaan PPh pasal 21 Badan belum mencapai target dalam lima tahun terakhir.
2. Pertumbuhan PDRB perkapita seharusnya dapat mendorong penerimaan PPh 21 Badan
3. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya penerimaan pajak Pasal 21 Badan

4. Jumlah angkatan kerja yang tidak berfluktuasi menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan PPh pasal 21 Badan

1.3 Pembatasan Masalah

Banyaknya faktor yang menyebabkan penerimaan PPh pasal 21 Badan belum mencapai target dalam lima tahun terakhir di KPP Pratama Binjai. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan batasan masalah dari penelitian yang dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai dengan hanya memperhatikan Jumlah Pemotong Pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk dengan menggunakan data dalam periode lima tahun terakhir.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah Jumlah Pemotong Pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21 Badan pada KPP Pratama Binjai?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21 Badan pada KPP Pratama Binjai?
3. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21 Badan pada KPP Pratama Binjai?

4. Apakah jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap penerimaan PPh 21 Badan pada KPP Pratama Binjai?
5. Apakah Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menganalisa pengaruh Jumlah Pemotong Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai
2. Menguji dan menganalisa pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai
3. Menguji dan menganalisa pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan PPH Pasal 21 pada KPP Pratama Binjai
4. Menguji dan menganalisa pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai
5. Menguji dan menganalisa pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses melakukan penerimaan pajak penghasilan

2. Bagi Para Praktisi

Untuk melihat pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai.

3. Bagi Penulis

Sebagai informasi dalam rangka memperluas pengetahuan mengenai pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap penerimaan PPH Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pajak Penghasilan

R, Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dirangkum oleh Waloyu dalam bukunya Perpajakan Indonesia yang berbunyi “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak terdapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Salah satu pengenaan pajak yang dikenakan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan perorangan, perusahaan atau Badan Hukum lainnya. Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang kemudian dalam perkembangannya Undang-undang ini dilakukan perubahan beberapa kali yaitu periode tahun 1990, 1994, 2000 dan terakhir diubah pada tahun 2008.

Menurut pasal 1 Undang-undang PPh, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam rumusan pasal tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa suatu subjek pajak dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, yang kemudian disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib

pajak dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Adapun yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan objek pengenaan PPh maka penghasilan dibedakan menjadi:

- a. Penghasilan terutang PPh pasal 25
- b. Penghasilan terutang PPh pasal 21
- c. Penghasilan terutang PPh pasal 22
- d. Penghasilan terutang PPh pasal 23
- e. Penghasilan terutang PPh pasal 24
- f. Penghasilan terutang PPh pasal 26
- g. Penghasilan terutang PPh pasal 4 ayat (2)
- h. Penghasilan terutang PPh pasal 15

Pajak penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang disingkat PPh 21 adalah pemotongan pajak atas berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak-orang pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan. Subjek pajak dalam

negeri pada pajak penghasilan pasal 21 adalah pegawai tetap, penerima pensiun, penerima honorarium, dan penerima upah.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Harnanto, 2003) Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak-orang pribadi dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang pemungutan atau pembayarannya dilakukan oleh pemotongan oleh pihak lain-pemberi kerja atau penghasilan. Pajak penghasilan obyek pajak terkait. Berikut pihak-pihak yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan (Undang-undang pajak penghasilan) berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorium, dan pembayaran lain dengan nama apapun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai; sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai, maupun bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendeharaan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah, maupun lembaga-lembaga negara lainnya atau kedaulatan besar republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorium, dan pembayaran

lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

- c. Dana pensiun termasuk PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jasostek) lainnya, serta badan lain yang membayar uang pensiun, tabungan atau tunjangan hari tua, dan imbalan lain dengan nama apapun.
- d. Perusahaan dan badan termasuk bentuk usaha tetap, badan milik negara dan badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan; yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak-orang pribadi dalam negeri, seperti dokter, pengacara, akuntan yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan atas nama perusahaannya.
- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan, badan pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya; yang membayarkan hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak-orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan

dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang dalam tahun yang bersangkutan. Sebagai wajib pajak dalam negeri pegawai atau orang pribaditersebut tidak lagi diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT tahunan). Kecuali apabila pegawai atau orang pribadi tersebut memperoleh penghasilan lain yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong oleh pihak lain dan bersifat final, maka ia diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan –SPT tahunan; dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja (bersifat tidak final) dapat diberlakukan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak penghasilan.

a. Penghasilan Obyek Pajak Pasal 21

Secara garis besar, penghasilan-penghasilan obyek pajak yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan tersebut di atas lebih lanjut dikelompokkan ke dalam 6 kategori, terutama apabila dilihat dari metode, prosedur atau cara perhitungan/pengukurannya.

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorium, premi bulanan, uang lembur, uang bantuan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan khusus, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, premi asuransi yang dibayar pemberikerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, grafitikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang tabungan hari tua yang dibayarkan oleh PT. Taspen.
5. Honorarium, uang saku, komisi dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri (badan dan orang pribadi)
6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

b. Penghasilan Tidak Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak semua penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dipotong atau dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan tidak dipotong atau tidak dikenakan pajak termasuk pajak penghasilan pasal 21 jelas sangat diperlukan untuk tujuan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan yang terutang, baik oleh wajib pajak sebagai penerima penghasilan, maupun bagi wajib pajak sebagai pemberi kerja. Termasuk dalam kategori penghasilan yang diterima oleh wajib

pajak orang pribadi dalam negeri dan tidak dipotong atau dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 21, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 6 kategori penghasilan sebagai berikut:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
2. Pembayaran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua dari PT. Taspen atau PT. Asabri
3. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh wajib pajak dan pemerintah
4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi pajak
5. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
6. Penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan, gaji atau uang pensiun.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian PDRB

Produk Domestik Bruto (PDB) sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Apabila diterjemahkan dalam tataran daerah maka PDB disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Salah satu model yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa (PDRB) suatu wilayah secara keseluruhan adalah Model Solow (Mankiw, 2006).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan

mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Dalam bukunya, Hadi Sasana menulis bahwa Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode (Hadi Sasana, 2006). Produk Domestik Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) bervariasi antar daerah.

Produk Domestik Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Pada perhitungan Produk Domestik Bruto (PDRB) dapat menggunakan dua harga yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan, yang dimana PDRB harga berlaku merupakan nilai suatu barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, dan PDRB harga konstan adalah nilai suatu barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang dijadikan sebagai tahun acuan atau tahun dasar.

Cara perhitungan Produk Domestik Bruto (PDRB) dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Rincian penjelasannya sebagai berikut :

1) Menurut Pendekatan Produksi

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangi nilai out put yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara lain dari masing-masing nilai produksi bruto dari setiap sektor ekonomi, nilai tambah ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas keikutsertaannya dalam proses produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sektor atau lapangan usaha antara lain pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari komponen – komponen tersebut harus dikurangi nilai impor

sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor netto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.

Produk Domestik Regional Bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen-komponen tersebut meliputi:

- a) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b) Konsumsi pemerintah.
- c) Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d) Perubahan stok.
- e) Ekspor netto.
- f) Menurut pendekatan pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung netto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga netto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

2. Manfaat dan Tujuan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Sebagai alat ukur perekonomian, Produk Domestik Bruto (PDRB) memiliki beberapa manfaat.. manfaat-manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah

Dengan adanya Produk Domestik Bruto (PDRB), negara dapat mengetahui sejauh mana perekonomian dalam satu daerah tumbuh

2) Membandingkan kemajuan ekonomi daerah

Setiap daerah memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dengan adanya Produk Domestik Bruto (PDRB), dapat dilihat produk dan jasa apa yang unggul dalam suatu daerah

3) Mengetahui struktur perekonomian suatu negara

Keluaran Produk Domestik Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai bahan pengkajian terkait sektor-sektor mana yang harus ditingkatkan dan perlu diperbaiki

4) Sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah

Tanpa adanya data yang bisa diandalkan, kebijakan yang dilahirkan suatu daerah akan sulit untuk dipastikan apakah berhasil atau tidak/

3. Indikator Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDRB)

Indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu:

a) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui Produk Domestik Regional Bruto riilnya.

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut serta faktor produksi dalam proses produksi.

2.1.3 Penduduk

1. Pengertian Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sedangkan menurut Said (2012: 136) yang dimaksud dengan penduduk adalah “jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu

wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”.

Reverend Thomas Maltus pada tahun 1798 (Arsyad, 2004: 223) mengemukakan teorinya tentang hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam tulisannya yang berjudul *Essay on the Principle of Population*, ia melukiskan konsep hasil yang menurun (*concept of diminishing return*). Maltus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut Maier (Kuncoro, 1997: 17) di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap *supply* bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit;
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka dan penduduk. Sebagian Karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya ke sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarannya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga kota.

Telaah lain menunjukkan bahwa penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi; satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti

tingkat penambahan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi penambahan penduduk dengan tingkat penghasilan rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Disisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996: 68).

Bagi negara-negara berkembang keadaan perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Karena akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan *output* dengan tingkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi, karena penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka paling tidak terdapat kesulitan memperoleh kesempatan kerja. Jika mereka tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi yang terus-menerus. Semua ini memerlukan lebih banyak investasi. Bagi negara berkembang, cepatnya perkembangan penduduk menjadi sebuah ganjalan dalam perkembangan ekonomi, karena negara-negara ini memiliki sedikit kapital. Todaro (2000: 144), menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan inflasi (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Jumlah inflasi yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak inflasi yang digunakan dalam proses produksi maka *output* hasil produksi akan mengalami peningkatan sampai batas tertentu.

Meskipun terdapat pertentangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang ditimbulkan oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk, namun selama beberapa dekade mulai muncul gagasan baru. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Robert Cassen dalam Todaro (2006: 351) sebagai berikut:

- 1) Persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah akan tetapi juga meliputi kualitas hidup dan kesejahteraan materiil;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang cepat memang mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Laju pertumbuhan penduduk yang terlampau cepat meskipun memang bukan merupakan penyebab utama dari keterbelakangan, harus disadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu faktor penting penyebab keterbelakangan di banyak negara;
- 3) Pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan dan hal itu merupakan masalah yang utama harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga. Mereka kemudian mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat mendorong timbulnya berbagai macam masalah ekonomi, sosial

dan psikologis yang melatarbelakangi kondisi keterbelakangan yang menjerat negara-negara berkembang.

Pertumbuhan penduduk juga menghalangi prospek tercapainya kehidupan yang lebih baik karena mengurangi tabungan rumah tangga dan juga negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menguras kas pemerintah yang sudah sangat terbatas untuk menyediakan berbagai pelayanan kesehatan, ekonomi dan sosial bagi generasi baru. Melonjaknya beban pembiayaan atas anggaran pemerintah tersebut jelas akan mengurangi kemungkinan dan kemampuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup generasi dan mendorong terjadinya transfer kemiskinan kepada generasi mendatang yang berasal dari keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. (Todaro, 2006: 259-260).

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk:

1) Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk, tingkat kelahiran dimasa lalu mempengaruhi tingginya tingkat fertilitas masa kini. Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup. Besar kecilnya jumlah kelahiran dalam suatu penduduk, tergantung pada beberapa faktor misalnya, struktur umur, tingkat pendidikan, umur pada waktu kawin pertama, banyaknya perkawinan,

status pekerjaan wanita, penggunaan alat kontrasepsi dan pendapatan/kekayaan Adioetomo dan Samosir (2011).

2) Kematian

Menurut Budi Utomo, 1985 (dalam Mantra, 2013) kematian adalah hilangnya seluruh tanda-tanda kehidupan secara permanen yang terjadi sewaktu-waktu setelah terjadinya kelahiran hidup. Dengan begitu dapat diartikan bahwa adanya proses kematian selalu didahului oleh proses kelahiran hidup. Sehingga tidak ada kematian jika sebelum proses kehidupan.

3) Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang bersifat menetap atau sementara. Menurut Viji (2013), ada dua faktor tertinggi yang menyebabkan seseorang bermigrasi, yaitu faktor pengakuan dan faktor permasalahan ketenagakerjaan. Faktor pengakuan yaitu terkait keinginan untuk pergi ke kota, gengsi yang tinggi, dan sebagai simbol kebesaran sehingga mendorong keinginan seseorang untuk mencari daerah yang lebih maju. Sedangkan permasalahan tenaga kerja yaitu terkait permintaan yang terlalu tinggi terhadap tenaga kerja, gaji rendah dan rendahnya peluang dalam lapangan pekerjaan sehingga hal tersebut menyebabkan seseorang berkeinginan untuk meninggalkan daerah tersebut.

3. Indikator Jumlah Penduduk

Indikator dalam penentuan jumlah penduduk didasarkan atas:

1) Usia

Usia meliputi kelahiran dan kematian penduduk dalam suatu wilayah

2) Status pernikahan

Status pernikahan penduduk dibedakan atas belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati

3) Migrasi

Perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain

4) Tempat lahir

Tempat lahir penduduk adalah provinsi tempat tinggal ibu kandung saat melahirkan.

2.1.4 Angkatan Kerja

1. Pengertian Angkatan Kerja

Batasan umur minimum usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun ke atas. Namun, nyatanya anak-anak (penduduk usia kerja < 15 tahun) sudah mulai terjun ke dunia kerja. Batasan umur penduduk usia kerja berbeda-beda di setiap negara, semakin maju perekonomian suatu negara atau daerah, maka umur usia kerja minimum sebagai tenaga kerja semakin tinggi.

Angkatan kerja (*labour force*) secara demografi angkatan kerja bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa

Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja. Dalam literatur biasanya adalah seluruh penduduk berusia 15–64 tahun. Tetapi kebiasaan yang dipakai di Indonesia adalah seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (hasil

sensus penduduk 1971 dan 1980). Jadi, tenaga kerja (*man power*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). Namun sejak penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.

2. Pengelompokan Angkatan Kerja

Angkatan kerja dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

- 1) Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka (*open employment*). Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia umumnya relatif rendah, yaitu 3%-5% per tahun.
- 2) Setengah menganggur (*Underemployed*), yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan definisi ini tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi, karena angkanya berkisar 35% per tahun.
- 3) Bekerja penuh (*Employed*), yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jasa kerjanya mencapai 35 jam per minggu.

Angkatan kerja sendiri erat kaitannya dengan pengangguran. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang

yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(Sonny, 2009), Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat angkatan kerja yakni:

1) Jumlah penduduk yang masih bersekolah

Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.

2) Jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga.

Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.

3) Tingkat penghasilan keluarga

Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relative meningkat.

4) Struktur Umur

Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan

mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

5) Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPK.

6) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

7) Kegiatan perekonomian.

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapanharapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.

4. Proyeksi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja erat kaitannya dengan proyeksi angkatan kerja. Proyeksi angkatan kerja dibuat untuk tiap-tiap kategori angkatan kerja

untuk tahun proyeksi yang dimaksud. Misal menurut kelompok dan umur tertentu. Untuk tiap-tiap kategori tersebut perlu tersedia angkata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk tahun dasar, dan kemudian diperkirakan angka ini untuk tahun proyeksinya.

Angka-angka yang diperlukan untuk bahan membuat proyeksi angkatan kerja adalah:

- 1) Angka proyeksi penduduk usia kerja. Di Indonesia pada waktu ini diambil penduduk yang berumur 10 tahun dan lebih, tanpa batas maksimum. Khusus di Indonesia kelompok ini disebut juga tenaga kerja.
- 2) Proyeksi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau angka perkiraan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk tahun-tahun proyeksi.

5. Ukuran Dasar Angkatan Kerja

Pengukuran angkatan kerja yang sering digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja biasanya dianalisis berdasarkan umur dan jenis kelamin. Dalam tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat persentase penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan produktifitas dengan perbandingan antara kelompok angkatan kerja dengan penduduk usia kerja secara keseluruhan. Semakin TPAK maka semakin besar keterlibatan usia kerja dalam pasar kerja.

Secara umum, rumus dari TPAK adalah:

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100\%$$

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut kelompok umur merupakan perbandingan antara kelompok angkatan kerja golongan umur tertentu dengan penduduk usia kerja golongan umur tertentu secara keseluruhan.

Rumus perbandingan TPAK menurut umur:

$$TPAK(Gol. Umur) = \frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ (Gol. Umur)}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja(Gol. Umur)} \times 100\%$$

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin

Tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan jumlah tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Rumus perbandingan TPAK untuk jenis kelamin laki-laki:

$$\begin{aligned} TPAK(Laki - laki) \\ = \frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ (Laki - laki)}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja} \times 100\% \end{aligned}$$

3) Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan atau lebih sering disebut pengangguran terbuka atau penuh. Untuk seseorang bekerja tidak tetap di luar keinginan sendiri atau bekerja dalam waktu lebih pendek dari biasanya biasanya disebut setengah menganggur.

Perbandingan jumlah pencari kerja sebagai alat ukur tingkat pengangguran atau disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja Sedang Mencari Kerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

2.1.5 Penerimaan Pajak Pasal 21

1. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut (Timbul dan Imam 2012:30) penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Sedangkan menurut (Suryadi, 2006:105) penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan komponen dalam pembiayaan negara dan berjalannya arus belanja rutin negara dan pembangunan.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut (rahayu, 2010:27) adalah

- 1) Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan
Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak

akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
- 4) Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
- 5) Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- 6) Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil”.

3. Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak penghasilan menurut Kuncoro (2013) adalah:

- 1) Target Penerimaan PPh
- 2) Realisasi Penerimaan PPh

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Muhammad Ikhsan Nasution (2017)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia	Produk Domestik Bruto Jumlah WP, Jumlah orang Bekerja, penanaman modal dalam negeri dan Asing serta Inflasi	Secara parsial, PDB, Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah orang Bekerja, penanaman modal dalam negeri dan Asing berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan inflasi BI Rate dan Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan.
Iswahyu Ramadhani (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Pph Pasal 21 Dan Pph Pasal 25/29 Orang Pribadi	PDRB per kapita, aktivitas ekonomi, dan jumlah angkatan kerja dan tingkat keterbukaan ekonomi	PDRB per kapita, aktivitas ekonomi, dan jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kapasitas pajak PPh pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi. Sedangkan tingkat keterbukaan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kapasitas pajak PPh pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi.
Rima Naomi Pangemanan (2013)	Hubungan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado	Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Pajak	Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan positif atau sangat kuat dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan

			Penerimaan Pajak Penghasilan.
Yudi Hariyanto dkk (2014)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)	Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa	Jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan jumlah Surat Pemberitahuan Masa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Secara parsial hanya variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, variabel jumlah Wajib Pajak dan jumlah Surat Setoran Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Mispiyanti dan Ike Nemi (2018)	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, Dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen Dan Purworejo	Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, Dan Tenaga Kerja	Secara parsial, PDRB dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo sedangkan inflasi dan nilai kurs tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. Sedangkan secara simultan, PDRB, inflasi, nilai kurs dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo.
Phany Ineke Putri (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Jumlah Penduduk, Pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah surat ijin usaha	Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi dan jumlah surat ijin usaha perdagangan terhadap penerimaan pajak reklame. Koefisien determinasi

			95,1% dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Pendapatan per kapita dan jumlah surat ijin usaha berpengaruh signifikan positif, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan negatif dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.
--	--	--	---

Sumber : Data diolah (2020)

2.3 Kerangka Konseptual

Penerimaan Pajak sangat dibutuhkan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bisa berbentuk kegiatan pemerintahan, melakukan pembangunan dan perawatan segala fasilitas umum yang nantinya akan diarahkan untuk tujuan pemerataan pembangunan yang selanjutnya akan bermanfaat bagi seluruh warga negara seperti yang dikemukakan oleh mengenai fungsi pemerataan pajak menurut Rismawati dan Antong (2015:3) yaitu: “Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.”

Penerimaan Negara dari sektor pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan ini bersumber dari Pendapatan rakyat seperti yang

dikemukakan oleh Herry Purwono (2010:88) yaitu “Pajak penghasilan, adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kewarganegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan Pembangunan Nasional. ”Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penerimaan PPh pasal 21 sebagai indikator penerimaan pajak”.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh badan subyek pajak dalam negeri. Untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan maka pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam membayar pajak salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.

1. Jumlah Pemotong Pajak Berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ada beberapa jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun

pajak yang disampaikan oleh Badan. Selain itu, Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong. Disini Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan, perhitungan, dan penyetoran pajak atas penghasilan orang pribadi atau badan.

Didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Putro Asdora (2014), dimana memperoleh bahwa Jumlah SPT yang digunakan oleh pemotong pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua nilai tambah barang atau jasa dihasilkan oleh daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terjadi akibat dari meningkatnya aktifitas perekonomian suatu daerah. Aktifitas perekonomian meningkat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Semakin meningkatnya pendapatan, jumlah harta/kekayaan dan besarnya pengeluaran masyarakat maka semakin tinggi kemampuan dalam membayar pajak terutama pajak penghasilan.

Namun PDRB Perkapita dipengaruhi jumlah penduduk, jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif dan negatif, PDRB Perkapita itu sendiri rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Nasution (2017) memperoleh bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21

Badan

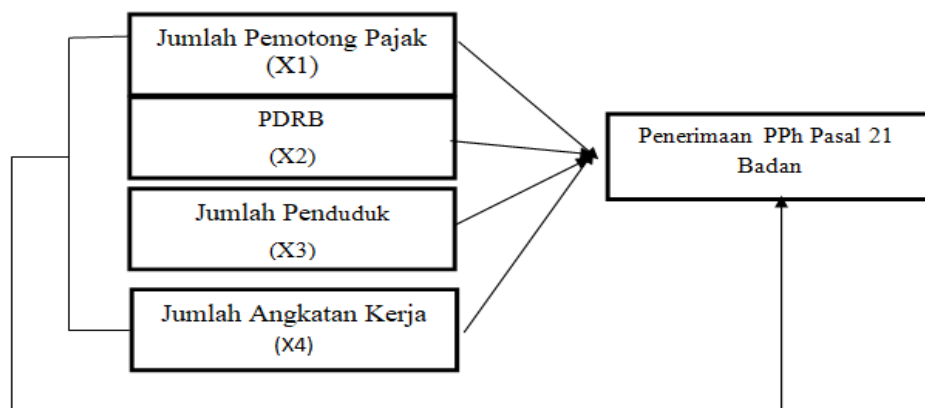
Sesuai dengan Teori Pertumbuhan Klasik yang di pelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Maltus, dan John Stuart Mill menurut teori ini pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Tetapi apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktifitas penduduk juga dalam perekonomian juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan adanya jumlah penduduk yang meningkat, maka penerimaan pajak juga akan meningkat karena terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif di dalam perekonomian. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan Nasution (2017), Dian Purnama Sari (2016) memperoleh bahwa Penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21.

4. Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Penerimaan PPh

21 Badan

Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia diikuti dengan baik oleh pertumbuhan jumlah yang bekerja. Semakin banyak jumlah yang bekerja diharapkan dapat meningkatkan jumlah orang wajib pajak. Dengan adanya pertambahan angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan, maka akan memberikan peningkatan penerimaan PPh pasal 21. Menurut Muhammad Ikhsan Nasution (2017), bahwa jumlah orang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan judul penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama binjai, maka dapat dilihat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPh pasal 21 pada KPP Pratama Binjai. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) ada pengaruh Jumlah Pemotong Pajak terhadap Penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai
- 2) ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai
- 3) ada pengaruh Jumlah penduduk terhadap Penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai

- 4) Ada pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai
- 5) PDRB, Jumlah Pemotong Pajak, Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2017:63) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mengacu pada hubungan mengacu pada hubungan kausal dimana menunjukkan hubungan yang bersifat sebab akibat dengan menunjukkan adanya variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berdasarkan prosedur statistik yang pengolahannya dibantu dengan aplikasi *software* SPSS 22. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian dengan cara diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang diambil yakni data bulanan Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 Badan, Jumlah Pemotong Pajak Kota Binjai diperoleh dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Kota Binjai sedangkan Jumlah PDRB Kota Binjai, Jumlah Penduduk Kota Binjai, dan Jumlah Angkatan Kerja Kota Binjai yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Kota Binjai.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, yang terletak di Jl. Jambi No.1 Medan. Ruang lingkup penelitian ini memusatkan pada pembahasan mengenai pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah

Penduduk, Angkatan Kerja dan Penerimaan PPh pasal 21 Badan. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019/2020. Penelitian dilaksanakan secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
		Nov-19	Des-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20
I.	Tahap Persiapan						
a.	Penyusunan Proposal						
b.	Perijinan Penelitian						
c.	Survey Objek Penelitian						
II.	Tahap Pelaksanaan						
a.	Perijinan Penelitian						
b.	Pengumpulan Data						
III.	Tahap Penyelesaian						
a.	Pengolahan Data						
b.	Pembahasan Data						
c.	Penyusunan Laporan						

Sumber: Data diolah (2020)

- 1) Tahap persiapan, dilaksanakan pada bulan November – Desember tahun 2019 meliputi Penyusunan Proposal, perijinan penelitian, survey objek penelitian.
- 2) Tahap pelaksanaan, dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020 hingga Januari tahun 2020 meliputi semua kegiatan yang dilakukan di lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder di KPP Pratama Binjai serta website resmi Badan Pusat Statistik Kota Binjai.
- 3) Tahap penyelesaian, dilaksanakan pada bulan Januari 2020 – April 2020 meliputi pengolahan data, pembahasan atas data yang diperoleh

berdasarkan hasil analisis dan teori-teori yang ada, serta penyusunan laporan.

3.3 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2013:91) menjelaskan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif (mewakili). Untuk dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti, maka sampel yang digunakan memakai sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2013:68), bahwa sample jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan definisi di atas, pengambilan sampel menggunakan pendekatan data berkala (*time-series*) dengan skala bulanan.

3.4 Defenisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2011: 39) Variabel Dependen sering disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang disebabkan/dipengaruhi oleh adanya variabel bebas/variabel independen. Besarnya perubahan pada variable ini tergantung dari besaran variable bebas/independen. Variable independen akan memberi peluang kepada perubahan variabel terikat/dependen yaitu sebesar koefisien (besaran) perubahan dalam variabel independen.

Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan Pajak Penghasilan Badan merupakan Pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan di mana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi dan menjadi penyebab berubahnya variabel dependen atau variable terikat. Variabel Independen merupakan variabel penelitian yang memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dipilih oleh seorang peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang sedang diamati.

Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah jumlah pemotong pajak, jumlah PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah angkatan kerja.

- a. Jumlah pemotong pajak merupakan badan pemberi kerja yang melakukan pemotongan pajak yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji yang dinyatakan dalam satuan.
- b. PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah yang dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah.
- c. penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk kota Binjai yang dihitung dalam satuan jiwa.

- d. Jumlah angkatan kerja merupakan seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa dan dinyatakan dalam satuan jiwa.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Jumlah Pemotong Pajak (X ₁)	Pemotong Pajak adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, nama apapun imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai (Mardiasmo, 2011)	Jumlah pemotong pajak tahun 2014 – 2019 di KPP Pratama Kota Binjai	Skala Rasio
PDRB (X ₂)	PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2013)	Data Jumlah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014 – tahun 2019 dalam	Skala Rasio
Jumlah Penduduk (X ₃)	Penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said, 2012)	Data Jumlah Penduduk yang tersensus selama periode 2014 – tahun 2019	Skala Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Jumlah Angkatan Kerja (X4)	Angkatan Kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa (BPS, 2013)	Data Jumlah Angkatan kerja yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Binjai selama periode 2014 – 2019	Skala Rasio
Jumlah Penerimaan PPh 21 Badan (Y)	Penerimaan PPh 21 Badan merupakan jumlah pajak yang diterima oleh KPP Pratama Binjai atas pajak yang dilaporkan pemotong pajak penghasilan.	Jumlah Penerimaan PPh 21 Badan selama Periode 2014 – 2019 di KPP Pratama Kota Binjai	Skala Rasio

Sumber: Data diolah (2020)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Cara yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan mengumpulkan jumlah penerimaan PPh pasal 21 dan jumlah pemotong pajak berupa laporan tahunan dan bulanan yang telah dipublikasi oleh KPP Binjai Pratama periode 2015-2019 dan data lainnya yakni PDRB, jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja diperoleh dari *official website* Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data yang digunakan mencakup statistik deskripsi, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. Sebelum melakukan uji analisis regresi linear berganda, maka hal yang pertama dilakukan adalah uji asumsi klasik dimana berupa uji normalitas, multikolinier, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adaah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi ayng berguna (Walpole 1995). Statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis dara yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono 2007) .Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum.

a. Rata-rata Hitung (Mean)

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilao rata-rata tersebut.

Rata-rata hitung (*mean*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Keterangan:

$\bar{X}$ = Mean (rata-rata)

$\sum X_i$ = Jumlah data X ke i hingga ke n

n = jumlah sampel

b. Standar deviasi

Standar deviasi sendiri merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari *mean*. Standar deviasi dapat menggambarkan seberapa besar variasi data, dimana jika nilai standar deviasi lebih besar berarti nilai *mean* merupakan representasi yang buruk bagi keseluruhan data. Namun, jika nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai *mean*, hal ini menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Standar deviasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$S = \sqrt{\frac{\sum f_i(X_i - \bar{X})^2}{(n - 1)}}$$

Keterangan:

S = simpangan baku

X = nilai X ke 1 hingga ke n

$\bar{X}$ = nilai rata-rata

n = jumlah sampel

2. Analisis Regresi Berganda

Sebelum melakukan uji analisis regresi linear berganda, maka hal yang pertama dilakukan adalah uji asumsi klasik, yang bertujuan untuk mendapatkan nilai estimasi yang diperoleh bersifat BLUE (*Best, Linear, Unbiased, and Estimator*), yang artinya nilai estimator yang terbaik, estimator yang linear, dan estimator yang tidak bias. Maka data-data yang digunakan dalam analisis regresi terlebih dahulu akan diuji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau uji normalitas ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Uji ini berguna untuk tahap awal dalam metode pemilihan analisis data. Jika data normal, maka digunakan statistik parametrik, dan jika data tidak normal maka digunakan statistik nonparametrik atau lakukan treatment agar data normal. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan analisis grafik dengan melihat grafik histogram atau *normal probability*.

Jika grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal, artinya titik puncak kurva berada di titik nol (0) pada sumbu X maka model regresi memenuhi syarat normalitas, begitu juga bila sebaliknya. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residul akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residul normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pengujian normalitas data juga dilakukan menggunakan alat uji statistik, yaitu alat statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Jika tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2009: 91) menyatakan bahwa, uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel- variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Ada tidaknya multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance} \quad \text{atau} \quad Tolerance = \frac{1}{VIF}$$

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Ghozali (2009:125) mengungkapkan bahwa model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

- 1) titik-titik data menyebar di atas, di bawah atau di sekitar angka nol.
- 2) titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah.
- 3) penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

d. Uji autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi atau kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$. Jika terjadi autokorelasi, maka terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2009:99). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data *time series*. Pada data *cross section*, masalah autokorelasi relatif tidak terjadi. Uji yang digunakan dalam penelitian untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW).

$$DW = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})}{\sum e_t^2}$$

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu (Ariefanto, 2012:30):

- 1) $0 < DW < DL$: ada korelasi negatif
- 2) $DL \leq DW \leq DU$: tidak ada kesimpulan
- 3) $4-DL < DW < 4$: ada korelasi positif
- 4) $4-DU \leq DW \leq 4-DL$: tidak ada kesimpulan
- 5) $DU < DW < 4 - DU$: tidak ada korelasi

e. Analisa Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk persamaan, dimana dalam regresi linier berganda variabel bebas lebih dari satu. Tujuan regresi linier berganda yakni untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dan memuat prediksi Y atas nilai X. Analisis ini menggunakan teknik analisis statistik SPSS dengan metode analisis regresi berganda dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

dimana:

Y = Jumlah Penerimaan PPh 21

X1 = Jumlah Pemotong Pajak

X2 = PDRB

X3 = Jumlah Penduduk

X4 = Jumlah Angkatan Kerja

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = *Standard Error* atau gangguan

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Menurut Sujarweni (2015:229) Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi

variabel terikat. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual.

Menurut Sugiyono (2014:250), dihitung menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = distribusi t

r = koefisien korelasi *pearson*

r^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data

t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) H_a diterima bila $t_{tabel} > t_{hitung}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya apabila > 0.05 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- 2) H_0 diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya apabila < 0.05 ; artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

b. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian Hipotesis Distribusi F pada model regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi

k = jumlah variabel independen

n = jumlah sampel/data

F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat akurasi atau signifikan 5% dengan kriteria penerimaan sebagai berikut:

- 1) Terima H_0 (tolak H_a) bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya apabila > 0.05 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Tolak H_0 (terima H_a) bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya apabila < 0.05 ; artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2013:95) koefisien determinasi ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel

terikat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinan. Koefisien determinan (R^2) merupakan besaran non negatif dan besarnya koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika koefisien determinan bernilai 0, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Sebaliknya jika koefisien determinan bernilai 1, maka ada keterikatan sempurna antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun rumus menghitung koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Besar atau koefisien determinasi

R^2 = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Binjai

KPP Pratama Binjai merupakan instansi pemerintahan dalam pelayanan pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. KPP Pratama Binjai beralamat di Jalan Jambi No. 01 Kota Binjai.

Sama halnya seperti KPP lainnya, KPP Pratama Binjai memiliki tugas seperti melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPn BM dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.01/2009.

a. Sejarah KPP Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03

Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kota madya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) KPP Medan Utara
- 2) KPP Medan Timur
- 3) KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94//KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 3 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- 1) KPP Medan Utara
- 2) KPP Medan Timur
- 3) KPP Medan Barat

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran kantor wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Bagian Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

- 1) KPP Medan Timur.
- 2) KPP Medan Kota
- 3) KPP Medan Barat
- 4) KPP Medan Polonia
- 5) KPP Medan Belawan
- 6) KPP Binjai

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Kordinator Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jendral Pajak, yang didalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi, dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 94/KMK-01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Kotamadya Binjai
- 2) Kabupaten Langkat
- 3) Kabupaten Deli Serdang yang meliputi:
 - a) Kecamatan Labuhan Deli
 - b) Kecamtan Sunggali
 - c) Kecamatan Pancur Batu
 - d) Kecamatan Hamparan Perak
 - e) Kecamatan Sibolangit
 - f) Kecamatan Kutalimbaru
- 4) Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan di Lungkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang artinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- 1) Kotamadya Binjai
- 2) Kabupaten Langkat

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai telah diserahkan kepada Pemerintah daerah.

b. Fungsi KPP Pratama Binjai

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor P3.
- 2) Penetapan dan penertiban produk hukum perpajakan.

- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- 6) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 8) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- 9) Pelaksanaan konsultasi Perpajakan
- 10) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi
- 11) Pembetulan ketetapan pajak
- 12) Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak

4.1.2 Deskripsi Data

Pada penelitian ini, terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini yakni Jumlah Penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Sedangkan variabel independen pada penelitian ini yakni Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja.

a. Penerimaan PPh Pasal 21 Badan

Penerimaan PPh pasal 21 Badan merupakan jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dipotong (objek) PPh pasal 21 yang berhubungan langsung dengan penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Subjek pajak Badan adalah setiap Badan Usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke

kas negara. Subjek pajak badan dalam penelitian ini yakni badan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Binjai. Data penerimaan PPh pasal 21 Badan diperoleh dari laporan penerimaan PPh pasal 21 di kantor KPP Pratama Binjai.

Tabel 4. 1 Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan dalam Periode Tahunan

Tahun	Penerimaan PPh 21 Badan (Rp.)	Pertumbuhan PPh Pasal 21 Badan (%)
2015	147754419493	-
2016	118557786742	-19.76
2017	115565149178	-2.52
2018	133094663775	15.17
2019	139220122494	-29.09

Sumber : KPP Pratama Binjai (Data Diolah, 2020)

Berdasarkan kontribusi jumlah penerimaan PPh pasal 21 Badan terhadap pendapatan KPP Pratama Binjai tahun 2015 – 2019 pada tabel 4.1 menunjukkan laju pertumbuhan penerimaan PPh 21 Badan kota Binjai dalam bentuk persentase dari Tahun 2015 sampai 2019 cenderung naik turun. Pertambahan penerimaan PPh pasal 21 Badan hanya terjadi pada tahun 2018 sebesar 15% sedangkan Penerimaan PPh 21 Badan paling menurun terjadi pada tahun 2019 sebesar 29% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

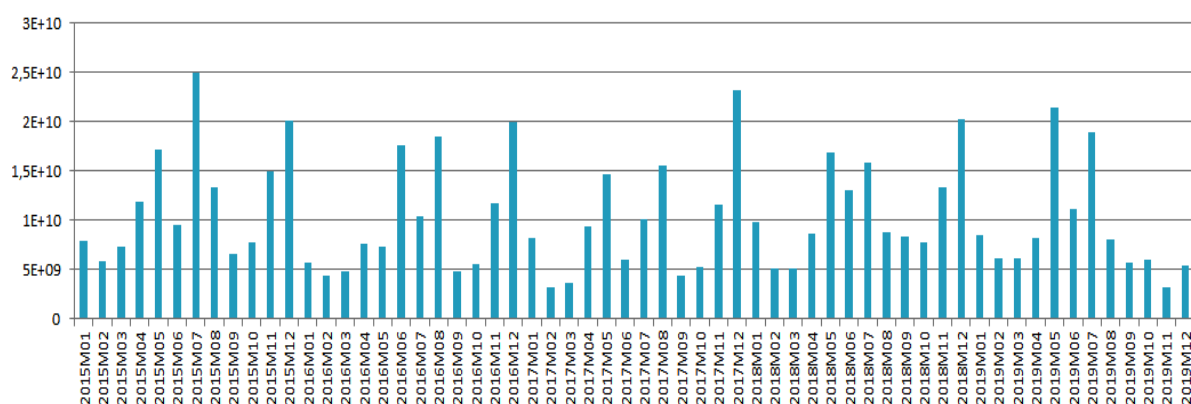
Tabel 4. 2 Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan Dalam Periode Bulanan

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	7948880006	5670255331	8282996192	9865193057	8495412747
2	5899913061	4443757454	3159174145	5138434563	6162815163
3	7299519513	4873927583	3701999611	5102099155	6134600067
4	1189621878 7	7617578314	9342714470	8627058401	8184186232
5	1712692923	7304168579	1473631142	1683398021	2149739204

	2		7	5	3
6	9594003107	1765147267 2	5967080718	1311868877 5	1114814475 5
7	2499532171 1	1035734462 0	1016166686 7	1585212769 6	1897403045 3
8	1340006612 9	1851670488 5	1554171106 1	8798270078	8129225980
9	6588788726	4906334645	4428330835	8360039651	5651517547
10	7814910126	5577104136	5307466147	7826580403	6059743216
11	1504497813 9	1169384295 0	1166411468 0	1337420194 4	3320234433 3
12	2014489095 6	1994529557 3	2327158302 5	2019798983 7	5446936773

Sumber : KPP Pratama Binjai (Data Diolah, 2020)

Perkembangan penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Kota Binjai dalam periode bulanan juga mengalami fluktuasi yang cenderung naik turun. Penerimaan PPh pasal 21 Badan Kota Binjai tertinggi pada periode lima tahun terakhir yakni sebesar Rp. 24.995.321.711 terjadi pada bulan Juli 2015. Sedangkan penerimaan PPh pasal 21 Badan Kota Binjai terendah pada periode lima tahun yakni Rp.3.159.174.145 terjadi pada Februari 2017.



Sumber : KPP Pratama Binjai (Data Diolah, 2020)

Gambar 4. 1 Grafik penerimaan PPh pasal 21 Badan dalam periode bulanan

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak, yakni target tahunan yang terlalu tinggi, kurangnya aparat, hingga lemahnya

aturan pendukung. Selain itu, ada faktor ekonomi global yang membuat beberapa pemasukan pajak menurun drastis.

Penurunan penerimaan PPh pasal 21 Badan dalam periode lima tahun juga dapat dikatakan tidak terlepas dari kebijakan dari pemerintah sendiri dimana kebijakan mengenai penyesuaian besaran PTKP Tahun 2016, yang berdampak pada berkurangnya jumlah WP orang pribadi karyawan yang wajib dipotong dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja. Pertumbuhan penerimaan PPh pasal 21 Badan terutama pada tahun 2018 didukung dengan adanya penyelenggaraan Asian Games 2018 dan peningkatan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, peningkatan PPh pasal 21 Badan juga dipengaruhi oleh membaiknya peningkatan pertumbuhan sektor yang pada karya seperti pengolahan, perdagangan serta jasa dan keuangan.

b. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Data jumlah penduduk diperoleh langsung Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai. Berikut data perkembangan jumlah penduduk kota Binjai selama periode tahun 2015-2019

Tabel 4. 3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai dalam periode Tahunan

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2015	264687	-
2016	267901	1,21
2017	270926	1,11
2018	273892	1,09
2019	271251	-0,9

Sumber: BPS Kota Binjai (Data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah penduduk Kota Binjai selama periode 2015-2019 pada tabel 4.3, laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan mulai tahun 2015 hingga tahun 2018. Sedangkan penurunan hanya terjadi pada tahun 2019 sebesar 0,9%. Pertumbuhan penduduk yang signifikan juga dapat dikatakan menjadi pendorong atau penghambat bagi pembangunan ekonomi, dimana akan mempengaruhi pendapatan perkapita, standar hidup, lapangan pekerjaan, angkatan kerja.

Tabel 4. 4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai dalam periode bulanan

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	263159	266459	269105	274196	279154
2	263441	266726	269376	274658	279509
3	263722	266991	269664	275111	279856
4	264001	267255	269971	275555	280194
5	264280	267517	270296	275990	280523
6	264557	267779	270639	276417	280843
7	264833	268039	271000	276834	281154
8	265107	268297	271380	277243	281457
9	265380	268555	271778	277643	281750
10	265652	268811	272194	278034	282035
11	265922	269065	272628	278416	282311
12	266191	269319	273081	278789	282578

Sumber : BPS Kota Medan (Data Diolah, 2020)

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai dalam periode bulanan mengalami peningkatan yang signifikan, namun perkembangannya masih cukup rendah. Perkembangan jumlah penduduk di kota Binjai masih berada satu persen. Hal ini dapat dikatakan akibat demografi penduduk seperti kelahiran,

kematian dan imigrasi. Pertambahan jumlah penduduk diakibatkan oleh jumlah kelahiran yang lebih tinggi daripada kematian.

Penduduk sebagai bagian dan faktor utama penyebab bertumbuhnya perekonomian daerah. Jumlah penduduk dalam pembangunan dalam suatu daerah selalu menjadi masalah yang paling dasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan ekonomi sendiri yaitu kesejahteraan rakyat.

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Salah satu model yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa (PDRB) suatu wilayah secara keseluruhan.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh faktor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksud merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai atas dasar berlaku. Berikut data perkembangan PDRB kota Binjai selama periode tahun 2015-2019.

Tabel 4. 5 Perkembangan PDRB Kota Binjai dalam Periode Tahunan

Tahun	PDRB	Pertumbuhan (%)
2015	31669,12	-
2016	33883,69	6.99
2017	36385,76	7.38
2018	39304,87	8.02
2019	36942,25	-6.01

Sumber: BPS Kota Binjai (Data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 Kota Binjai selama periode tahun 2015-2019 pada tabel 4.3, dapat diamati bahwa secara umum PDRB Kota Binjai mengalami peningkatan setiap tahun kecuali pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3.27%

Tabel 4. 6 Perkembangan PDRB Kota Binjai dalam periode bulanan

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	35243,38	32821,09	35867,79	37318,29	36283,14
2	33007,64	31232,04	30738,3	31918,32	33773,78
3	34168,83	31400,62	30900,88	31743,76	33579,25
4	38555,44	34571,87	36904,78	36490,54	35659,83
5	40390,88	34369,35	39373,81	40187,99	41803,8
6	37111,62	40593,51	33196,18	38760,42	37938,92
7	42205,14	37732,89	37524,76	39984,84	40997,99
8	39169,61	40795,88	39781,42	36697,75	35451,7
9	33970,31	31571,19	31065,46	36075,55	32636,55
10	34776,38	32454	32094,88	34982,89	33386,72
11	39577,75	38350,19	38144,69	38965,15	42405,42
12	41401,42	41199,83	42004,6	41602,74	32273,44

Sumber: BPS Kota Binjai (data diolah, 2020)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan dalam periode bulanan mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan/penurunan PDRB kota Binjai dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang terjadi. Dimana di kota Binjai

sendiri masih didominasi oleh sektor perdagangan dan disusul oleh sektor jasa, konstruksi dan industri. Penurunan daya beli masyarakat akan barang dan jasa, lemahnya transaksi ekonomi kota Binjai di sektor perdagangan, industri dan pertanian menjadi penyebab penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Binjai.

d. Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labour force*) secara demografi angkatan kerja bergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu berapa persen dari tenaga kerja yang menjadi angkatan kerja. Jadi, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yang memproduksi barang dan jasa. Data angkatan kerja diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Binjai. Berikut data perkembangan angkatan kerja kota Binjai selama periode tahun 2015-2019.

Tabel 4. 7 Perkembangan Angkatan Kerja Kota Binjai dalam Periode Tahunan

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2015	125172	-
2016	119542	-4.5
2017	122234	2.25
2018	133331	9.07
2019	128517	-3.6

Sumber: BPS Kota Binjai (Data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2010 Kota Binjai selama periode tahun 2015-2019 pada tabel IV.4, dapat diamati bahwa secara umum PDRB Kota Binja mengalami berfluktuasi. Dimana

jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dan penurunan selama periode tahun 2015-2019.

Tabel 4. 8 Perkembangan jumlah angkatan kerja dalam periode bulanan

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	10849	10062	9967	10907	11113
2	10757	10028	9991	10974	11070
3	10670	9998	10019	11033	11019
4	10587	9974	10053	11082	10958
5	10510	9954	10091	11123	10887
6	10437	9939	10134	11154	10808
7	10369	9929	10182	11176	10719
8	10306	9923	10234	11188	10621
9	10247	9923	10292	11192	10514
10	10194	9927	10355	11186	10398
11	10145	9936	10422	11171	10272
12	10101	9950	10494	11147	10138

Sumber: BPS Kota Binjai (data diolah, 2020)

Perkembangan jumlah angkatan kerja periode bulanan dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung naik turun. Peningkatan/penurunan jumlah angkatan kerja yang terjadi di kota Binjai akibat dari meningkatnya jaminan kesehatan yang mengakibatkan bertambahnya usia rata-rata penduduk dan otomatis akan menambah jumlah angkatan kerja. Akibat lainnya seperti tingkat upah, tingkat pendidikan, tingkat upah dan struktur umur.

Peningkatan jumlah angkatan kerja dapat dikatakan memberi efek negatif, karena di dalam angkatan kerja masih terkandung angkatan kerja sedang mengangur yang sangat tinggi. Selain itu, adanya angkatan kerja yang sekolah dan mengurus rumah tangga dalam jumlah tinggi juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Selain itu, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi akibat meningkatnya jumlah pengangguran.

e. Pemotong Pajak

Pemotong Pajak adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, nama apapun imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Data pemotong pajak di kota Binjai diperoleh dari KPP Pratama Binjai.

Tabel 4.5 Perkembangan Pemotong Pajak Kota Binjai dalam Tahunan

Tahun	Jumlah Pemotong Pajak	Pertumbuhan (%)
2015	19967	-
2016	22381	12
2017	21238	-5
2018	25212	18
2019	28123	11

Sumber: KPP Pratama Binjai (Data diolah, 2020)

Berdasarkan hasil analisis terhadap jumlah pemotong pajak selama periode tahun 2015-2019 pada tabel IV.5 dapat diamati bahwa secara umum pemotong pajak mengalami peningkatan setiap tahun kecuali tahun 2017 dengan rata-rata peningkatan sebesar 7%.

Tabel 4. 9 Perkembangan jumlah pemotong pajak periode bulanan

Bulan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1	1870	1860	1562	1882	2140
2	1743	1718	2355	2387	1485
3	1738	1770	2339	1757	1880
4	1837	2247	1737	1879	1882
5	1822	2304	2043	1597	2401
6	1805	2322	2371	2163	1805
7	1991	1743	2068	2206	1876
8	1964	1765	2117	1630	2227
9	1736	1875	1748	1786	2415
10	2267	1868	1661	1690	1851
11	1849	1786	2093	1826	1524
12	2286	2017	1741	2185	2429

Sumber : KPP Pratama Binjai (Data Diolah, 2020)

Jumlah pemotong pajak dalam periode bulanan juga mengalami kenaikan dan penurunan. Pertambahan pemotong pajak di Kota Binjai dapat dikatakan adanya pertambahan pemberi kerja yang terdiri dari badan dan berhubungan langsung dengan jumlah wajib pajak badan untuk mengisi dan menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan.

Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya usaha/industri di Kota Binjai sendiri yang menjadi pemotong pajak atas penghasilan yang diperoleh. Ada pertambahan pemotong pajak di kota Binjai juga dikatakan sebagai adanya peningkatan kegiatan ekonomi atas usaha/industri yang berjalan.

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari analisis dasar yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel dalam menjelaskan deskriptif statistik, dimana terdiri atas 1 (satu) variabel dependen dan 4 (empat) variabel independen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan PPh 21 Badan, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Angkatan Kerja. Deskriptif data dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum dan deviasi standar dari setiap variabel dalam penelitian ini dan dapat dilihat pada pada berikut :

Tabel 4. 10 Statistik Deskripsi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Pemotong Pajak	60	1485,00	2429,00	1948,6833	255,65804
PDRB	60	2561,50	3294,20	2969,7600	232,01573
Jumlah Penduduk	60	263159,00	274126,00	269731,4500	3339,60541
Jumlah Angkatan Kerja	60	9923,00	11192,00	10479,9833	450,51987
Penerimaan PPh 21 Badan	60	3159174145,00	24995321711,0	10467639474,950	5507659307,3420
Valid N (listwise)	60				

Sumber : SPSS (2020)

- a) Dari data Jumlah Pemotong Pajak tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar 1948,68 dengan standar deviasi 255,65. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah pemotong Pajak yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata Jumlah Pemotong Pajak sebesar 1948,68 lebih mendekati kearah maksimum, sehingga rata-rata Jumlah Pemotong Pajak dalam sampel penelitian ini cukup tinggi.
- b) Dari data PDRB tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar 2969,76 dengan standar deviasi 232,01. Dengan demikian dapat dilihat

bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PDRB yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata PDRB sebesar 2969,76 lebih mendekati ke arah maksimum, sehingga rata-rata PDRB dalam sampel penelitian ini cukup tinggi.

- c) Dari data jumlah penduduk tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar 269731,45 jiwa dengan standar deviasi 3339,60. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk yang digunakan dalam penelitian ini sangat bervariasi. Nilai rata-rata jumlah penduduk sebesar 2969,76 lebih mendekati ke arah minimum, sehingga rata-rata jumlah penduduk dalam sampel penelitian ini cukup rendah.
- d) Dari data jumlah angkatan kerja tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar 10479,98 jiwa dengan standar deviasi 450,51. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Angkatan Kerja yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi. Nilai rata-rata jumlah angkatan kerja sebesar 10479,98 lebih mendekati ke arah minimum, sehingga rata-rata jumlah angkatan kerja dalam sampel penelitian ini cukup rendah.
- e) Dari data Penerimaan PPh 21 Badan tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata (*mean*) sebesar 1,04 M dengan standar deviasi 5,50 M. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-

rata. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerimaan PPh 21 Badan yang digunakan dalam penelitian ini sangat bervariasi. Nilai rata-rata Penerimaan PPh 21 Badan sebesar 1,04 M lebih mendekati ke arah minimum, sehingga rata-rata Penerimaan PPh 21 Badan dalam sampel penelitian ini cukup rendah.

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik pada regresi linier berganda dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini bebas dari asumsi-asumsi klasik dimana data terbukti normal, bebas dari heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik yakni untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai hasil uji asumsi klasik dengan bantuan *software* SPSS 22.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu bentuk pengujian data yang terdistribusi normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diambil sudah terdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Kolmogorov Smirnov*. Uji *Kolmogorov Smirnov* digunakan untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak, dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya. Berikut hasil uji normalitas dengan menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000131
	Std. Deviation	2206569465
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,099
	Negative	-,070
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Berdasarkan Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov Z* sebesar 0,099 dan Asymp.Sig. sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel-variabel bebas pada model regresi linear berganda. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*). Model dikatakan terbebas dari multikolinearitas jika nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Berikut hasil uji multikolinearitas yang diperoleh:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB	,983	1,017
	Jumlah Penduduk	,662	1,510
	Jumlah Angkatan Kerja	,645	1,550
	Jumlah Pemotong Pajak	,946	1,057

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

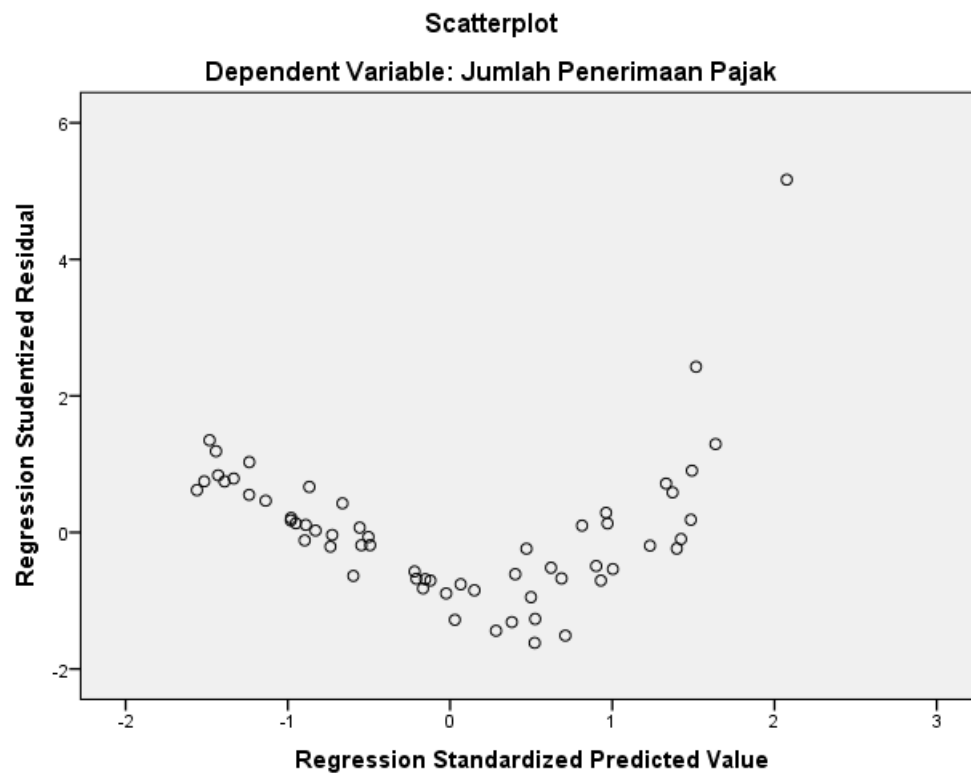
Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Hasil uji multikolinearitas dari nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel dependen yang memiliki *tolerance* kurang dari 0,10. Serta hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel dependen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi di antara variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah didalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari satu pengamatan dengan pengamatan yang lain sehingga uji hipotesis dan kesimpulan menjadi akurat. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Berikut gambar Scatterplot untuk melihat

heteroskedastisitas:



Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Gambar 4. 2 Scatterplot Model

Analisis pada gambar Scatterplot yang menyatakan model regresi berganda tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. titik-titik data menyebar di atas, di bawah atau di sekitar angka nol.
2. titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau dibawah.
3. penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola

Dari gambar Scatterplot diperoleh bahwa ada syarat tidak dipenuhi sehingga disimpulkan bahwa model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. Sehingga dilakukan uji park untuk mengatasi masalah heterokedastisitas. Dikatakan tidak mengalami heterokedatisitas jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 pada uji park. Berikut hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji park:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Park

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	,430	,669
PDRB	1,345	,184
Penduduk	,100	,921
Ang, Kerja	-,794	,431
Pemotong Pajak	-	,096
	1,692	

a. Dependent Variable: Penerimaan

PPh 21 Badan

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Berdasarkan hasil uji park yang diperoleh dapat dilihat bahwa nilai t signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dalam model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Bebas Autokorelasi berarti bahwa error pada data bersifat independen sehingga nilai dari pengaruh variabel-variabel yang diteliti konsisten dan tidak

bias. Autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antar data pada model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson pada hasil pengolahan data. Adapun kriteria penerimaan bahwa model bebas autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Kriteria Penerimaan Model Bebas Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < DW < DL$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$DL \leq DW \leq DU$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-DL < DW < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Decision	$4-DU \leq DW \leq 4-DL$
Tidak ada autokorelasi, negatif atau positif	Tidak ditolak/diterima	$DW < 4 - DU$

Adapun hasil perhitungan uji autokorelasi dengan Durbin Watson disajikan dibawah ini :

Tabel 4. 15 Hasil Uji Autokorelasi sebelum Cochrane Orcutt

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,935 ^a	,874	,865	228540022,50738	2,384

a. Predictors: (Constant), Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Dari hasil perhitungan bahwa nilai Durbin-Watson diperoleh sebesar 2,384 sedangkan nilai $DL = 1,7274$ dan nilai $DU = 1,443$. Hal ini menyebabkan nilai DW berada daerah $4-DU \leq DW \leq 4-DL$ sehingga disimpulkan tidak ada keputusan ada tidaknya autokorelasi. Selanjutnya digunakan uji Cochrane Orcutt

untuk mengatasi masalah autokorelasi. Berikut hasil uji Cochrane Orcutt yang diperoleh:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Autokorelasi setelah Cochrane Orcutt

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,288 ^a	,083	,016	2,07499	1,901

a. Predictors: (Constant), PDRB, Pemotong Pajak, Penduduk, Angkatan

Kerja

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,901 dan berada pada daerah DU $(1,443) < DW (1,901) < 4 - DU (2,2726)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi.

4.1.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mencari pengaruh variabel independen (Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja) dengan Penerimaan PPh 21 Badan. Berikut hasil regresi berganda yang diperoleh:

Tabel 4. 17 Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-5,993E+10	1,372E+10		,000
	PDRB	1655276,464	85138,920	,938	,000
	Jumlah Penduduk	130006,332	60641,475	,126	,036
	Jumlah Angkatan Kerja	-2196334,625	822333,384	-,159	,010
	Jumlah Pemotong Pajak	-937128,018	1196570,733	-,039	,437

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Berdasarkan nilai koefisien dari tabel di atas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = (-59928760102,197) - 937128X_1 + 1655276X_2 + 130006X_3 - 2196334X_4$$

Berdasarkan persamaan yang diperoleh, dapat diketahui hasil regresi linier berganda menunjukkan:

- nilai konstanta sebesar -59928760102 yang artinya jika nilai Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Penduduk dan Angkatan Kerja bernilai 0, maka Penerimaan Pajak PPh pasal 21 Badan bernilai -59928760102. Dimana tanda negatif disini menunjukkan Penerimaan PPh pasal 21 Badan yang mengalami penurunan/terutang. Selain itu, nilai konstanta negatif (59928760102) diartikan juga bahwa rata-rata kontribusi variabel lain di luar model memberikan dampak negatif terhadap Penerimaan PPh pasal 21 Badan.
- Jika nilai variabel Jumlah Pemotong Pajak (X_1) = 1 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau bernilai 0 maka variabel Jumlah Pemotong

Pajak (X_1) berkontribusi terhadap Penerimaan PPh 21 Badan sebesar -937128. Jika Jumlah Pemotong Pajak meningkat 1% maka Penerimaan PPh 21 Badan menurun sebesar -937128.

- c. Jika nilai variabel PDRB (X_2) = 1 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau bernilai 0 maka variabel variabel PDRB (X_2) berkontribusi terhadap Penerimaan PPh 21 Badan sebesar 1655276. Jika PDRB meningkat 1% maka Penerimaan PPh 21 Badan meningkat sebesar 1655276. Sebaliknya jika PDRB menurun 1% , maka Penerimaan PPh 21 Badan menurun sebesar 1655276.
- d. Jika nilai variabel Jumlah Penduduk (X_3) = 1 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau bernilai 0 maka variabel Jumlah Penduduk (X_3) berkontribusi terhadap Penerimaan PPh 21 Badan sebesar 130006. Jika Jumlah Penduduk meningkat 1% maka Penerimaan PPh 21 Badan meningkat sebesar 130006. Sebaliknya jika Jumlah Penduduk menurun 1% , maka Penerimaan PPh 21 Badan menurun sebesar 130006.
- e. Jika nilai variabel Jumlah Angkatan Kerja (X_4) = 1 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau bernilai 0 maka variabel Jumlah Angkatan Kerja (X_4) berkontribusi terhadap Penerimaan PPh 21 Badan sebesar -2196334. Jika Jumlah Angkatan Kerja meningkat 1% maka Penerimaan PPh 21 Badan menurun sebesar 2196334.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial atau masing masing variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan $\alpha = 5$. Variabel independen dikatakan berpengaruh secara parsial jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai T tabel dapat dicari dengan signifikansi $0,05/2 = 0,025$ dengan $df = 55$. Maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,004. Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu :

- 1) H_{0b} diterima bila $t_{tabel} > t_{hitung}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya apabila > 0.05 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- 2) H_{1b} diterima bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau dapat dilihat dari nilai signifikansinya apabila < 0.05 ; artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Berikut hasil t_{hitung} yang diperoleh:

Tabel 4. 18 Hasil Uji t (parsial)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	-4,368	,000
PDRB	19,442	,000
Jumlah Penduduk	2,144	,036
Jumlah Angkatan Kerja	-2,671	,010
Jumlah Pemotong Pajak	-,783	,437

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Hipotesis:

H_{0b} = Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

H_{1b} = Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja secara parsial berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh t_{hitung} dari masing-masing variabel yaitu:

a. Jumlah Pemotong Pajak

Hasil pengujian dengan menggunakan *software* SPSS 22 diperoleh t_{hitung} sebesar -0,783 dan probabilitas 0,437 sedangkan t_{tabel} untuk jumlah data 60 dengan signifikansi 5% dan derajat kebebasan $(dk) = 60 - 5 = 55$ diperoleh t_{tabel} 2,004. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau -0,783 < 2,004 dan dapat dilihat dari nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 5% atau 0,437 > 0,05 maka disimpulkan bahwa menerima H_{0b} dan menolak H_{1b} . Dengan demikian Jumlah Pemotong Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Badan.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hasil pengujian dengan menggunakan *software* SPSS 22 diperoleh t_{hitung} sebesar 19,442 dan probabilitas 0,000 sedangkan t_{tabel} untuk jumlah data 60 dengan signifikansi 5% dan derajat kebebasan $(dk) = 60 - 5 = 55$ diperoleh t_{tabel} 2,004. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih dari t_{tabel} atau 19,442 > 2,005 dan dapat dilihat dari nilai probabilitas kurang dari nilai signifikansi 5% atau 0,000 < 0,05 maka disimpulkan bahwa menolak H_{0b}

dan menerima H_{1b} . Dengan demikian variabel PDRB secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Badan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

c. Jumlah Penduduk

Hasil pengujian dengan menggunakan *software* SPSS 22 diperoleh t_{hitung} sebesar 2,144 dan probabilitas 0,036 sedangkan t_{tabel} untuk jumlah data 60 dengan signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $60 - 5 = 55$ diperoleh t_{tabel} 2,004. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $2,144 > 2,004$ dan dapat dilihat dari nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 5% atau $0,036 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa menolak H_{0b} dan menerima H_{1b} . Dengan demikian variabel Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Badan.

d. Jumlah Angkatan Kerja

Hasil pengujian dengan menggunakan *software* SPSS 22 diperoleh t_{hitung} sebesar -2,671 dan probabilitas 0,010 sedangkan t_{tabel} untuk jumlah data 60 dengan signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $60 - 5 = 55$ diperoleh t_{tabel} 2,004. Sehingga diperoleh bahwa $|t_{hitung}|$ kurang dari t_{tabel} atau $|-2,671| < 2,004$ dan dapat dilihat dari nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikansi 5% atau $0,010 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa menerima H_{0b} dan menolak H_{1b} . Dengan demikian variabel Angkatan Kerja secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Badan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5%.

b. Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji F digunakan yakni untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, dengan menggunakan keyakinan 95% dengan $\alpha = 5\%$, dan k atau jumlah seluruh variabel baik variabel dependen dan independen adalah 5, maka nilai df_1 berjumlah 3 dan df_2 berjumlah 55. Sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2,77. Berikut hasil Uji F:

Tabel 4. 19 Hasil Uji t (parsial)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,997E+21	4	4,993E+20	95,605	,000 ^b
	Residual	2,873E+20	55	5,223E+18		
	Total	2,285E+21	59			

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Hipotesis:

H_{0a} = Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

H_{1a} = Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Berdasarkan tabel di atas, F hitung sebesar 95,6. Dimana nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu 2,77 dan dilihat dari nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansi

($\alpha = 5\%$) . Artinya H_0 ditolak dan menerima H_1 yakni Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis koefisien determinasi yang diperoleh:

Tabel 4. 20 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,935 ^a	,874	,865	2285400222

a. Predictors: (Constant), Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

Sumber : SPSS, data diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,865 atau 86,5%. Hal ini menunjukkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja) terhadap variabel dependen (Penerimaan PPh Pasal 21 Badan) yaitu sebesar 86,5% sedangkan sisanya 13,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Bagi wajib pajak, sangat dipermudah dalam pelaporan pajak dengan adanya *system self assesment*. Sehingga Penerimaan PPh 21 Badan sangat bergantung

pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan akan sanksi tersebut. Dengan tingginya kepatuhan dan kesadaran akan pajak, maka dapat meningkatkan Penerimaan PPh pasal 21 Badan. Dalam menata dan meningkatkan penerimaan PPh 21 Badan, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja dan Jumlah Pemotong Pajak.

Mengacu pada hasil penelitian, yakni analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan PPh Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Binjai dengan variabel independen (Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja) menunjukkan bahwa secara simultan (uji F statistik), keempat variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan.

Secara parsial (Uji *t-test*) dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Badan adalah PDRB, dan Jumlah penduduk, Jumlah Angkatan Kerja. Untuk variabel lain yakni Jumlah Pemotong Pajak pengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan.

4.2.1 Pengaruh Jumlah Pemotong Pajak Terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh Jumlah Pemotong Pajak terhadap Penerimaan PPh pasal 21 Badan. Berdasarkan Hasil analisis dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Jumlah Pemotong Pajak pengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh 21

Badan. Hal ini dapat terlihat juga pada pola data dari kedua variabel. Dimana Jumlah Pemotong Pajak memiliki pola horizontal yang mana data jumlah Pemotong Pajak Berfluktasi disekitar nilai rata-rata yang konstan. Dan berbeda dengan pola data Penerimaan Pajak PPh pasal 21 Badan yang pola musiman. Pola musiman pada Penerimaan Pajak PPh pasal 21 Badan diakibatkan adanya tenggat waktu pembayaran pajak. Ketika mendekati tenggat waktu pembayaran pajak, terjadi kenaikan penerimaan pajak pada bulan tertentu dan hal ini terjadi secara periodik (berulang).

Bertambahnya jumlah pemotong pajak tidak mendukung adanya penambahan penerimaan PPh 21 Badan karena kembali lagi kepada kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar kewajiban perpajakan terutama pada pajak penghasilan. Adanya motif dalam pelaporan dapat berupa seperti motif bisnis tertentu untuk memiliki NPWP agar tidak kena denda, serta kurangnya pengawasan sehingga terjadi penghindaran pajak atau penggelapan pajak yang nantinya akan mengurangi penerimaan pajak penghasilan. Motif lainnya yakni tidak diberikannya bukti potong pajak atau memberikan bukti potong setelah wajib pajak atas penghasilannya, menyampaikan SPT tahunannya.

Namun tidak dipungkiri juga, ketika melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 Badan sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang harusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik bagi wajib pajak dikarenakan sanksi dari kantor pajak maupun bagi negara karena berkurangnya penerimaan sektor pajak PPh pasal 21 Badan.

Hal ini bertentangan oleh penelitian Putri Asdora (2014) dimana secara parsial Jumlah WP Badan berpengaruh positif terhadap jumlah SPT Tahunan. Dan Jumlah SPT Tahunan berpengaruh negatif terhadap total penerimaan pajak. SPT Tahunan digunakan sebagai variabel intervening. Padahal dengan adanya pemotong pajak, pemerintah dapat memperluas pemajakan terhadap wajib pajak badan yang belum terjangkau, penyetoran tepat waktu, mudah dan sederhana karena penerimaan pajak melalui pemotong pajak terjadi otomatis dan pembayaran pajak dilakukan saat penghasilan diterima atau diperoleh sehingga pihak yang terpotong tidak terlalu terbebani.

4.2.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan PPh pasal 21 Badan. Berdasarkan hasil analisis dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan.

Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan PPh pasal 21 Badan mengindikasikan bahwa jumlah penerimaan PPh pasal 21 Badan dipengaruhi oleh PDRB. Dengan peningkatan PDRB dalam penyediaan barang dan jasa meningkatkan pertumbuhan akan angkatan kerja, persediaan modal dan penerimaan pajak terutama PPh pasal 21 Badan. Hal ini didukung dengan PDRB Kota Binjai yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Binjai masih di dominasi dengan sektor industri, jasa, perdagangan, dan pertanian. Pertambahan setiap sektor industri ini mendobrak pertambahan barang dan jasa di kota Binjai. Penambahan barang dan jasa di kota Binjai dikatakan juga sebagai bertambahnya kemampuan dalam mengolah sumber daya alam.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Binjai sendiri akan mendorong terbukanya sektor ekonomi yang nanti akan menambah penambahan PPh 21 Badan. Selain itu, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Binjai akan memiliki efek yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Dimana peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat.

Jika pertumbuhan ekonomi dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka pendapatan atau upah masyarakat juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat meningkatkan penarikan pajak jenis tertentu terutama pada penerimaan pajak penghasilan pasal 21 Badan.

Temuan ini didukung oleh Muhammad (2017) dimana hasil penelitian secara parsial, PDB berpengaruh positif dan signifikan dalam penerimaan pajak penghasilan. Dalam hal ini juga mengendifikasikan bahwa Peningkatan PDB mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak. Denny George (2018) dalam penelitiannya, secara parsial PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan PPh 21 Badan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan PPh pasal 21 Badan. Berdasarkan hasil analisis dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis, diperoleh jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kota Binjai. Terdapatnya pengaruh antara penduduk terhadap penerimaan PPh 21 Badan mengindikasikan bahwasanya penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk Kota Binjai.

Terdapatnya pengaruh antara penduduk terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan sesuai dengan teori perpajakan oleh Musgrave (1997) yang mengemukakan bahwa jumlah besar kecilnya penerimaan di sektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk. Melihat di dalam masyarakat khususnya kota Binjai sendiri, terdapat masyarakat yang dominan bekerja di lapangan usaha jasa-jasa, perdagangan, bangunan dan disusul oleh lapangan usaha lain seperti pertanian, industri dan angkutan. Masyarakat yang dominan bekerja jasa-jasa, perdagangan termasuk kategori dalam subjek penerimaan pajak. Dengan memiliki NPWP atas usaha jasa dan perdagangan mampu mendorong penerimaan pajak terutama dalam pajak penghasilan.

Namun, temuan Dian Purnama Sari bertentangan, dimana secara parsial jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah. Hal ini disebabkan Hal ini berarti bahwa banyaknya jumlah penduduk belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak karena tidak semua penduduk pada usia

produktif 15-64 tahun memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, terutama dalam ruang lingkup pembayaran pajak daerah.

4.4 Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penerimaan PPh 21

Badan

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah ada pengaruh Jumlah Angkatan Kerja terhadap Penerimaan Pajak pasal 21 Badan. Berdasarkan hasil analisis dengan regresi linier berganda dan pengujian hipotesis diperoleh bahwa Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan Penerimaan PPh Pasal 21 Badan. Apabila Jumlah Angkatan Kerja mengalami peningkatan maka penerimaan PPh 21 Badan juga akan mengalami penurunan.

Kecendrungan hubungan negatif antara Jumlah Angkatan Kerja dan penerimaan PPh pasal 21 Badan dapat diakibatkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dan keterbatasan kesempatan kerja. Masalah pengangguran dan keterbatasan kesempatan kerja saling berhubungan satu sama lainnya. Masalah pengangguran yang tinggi timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini karena Kota Binjai merupakan daerah agraris atau bukan daerah industri.

Namun, seharusnya Angkatan kerja sebagai subjek pajak penghasilan merupakan paling banyak memberi kontribusi pada penerimaan pajak PPh pasal 21 Badan. Dengan bertambahnya angkatan kerja maka terjadi juga pertambahan penerimaan PPh pasal 21 Badan karena adanya peningkatan pemberian upah atau pendapatan bagi angkatan kerja.

Dalam hal ini, angkatan kerja merupakan target utama dalam penerimaan PPh pasal 21 Badan di Kota Binjai. Namun, banyak angkatan kerja dalam usia produktif dalam menghasilkan barang dan jasa belum tentu memiliki pekerjaan dan pekerjaan tetap, sehingga mengakibatkan penurunan penerimaan pajak.

Bukan angkatan kerja yang sekolah paling banyak jumlahnya dibandingkan bukan angkatan kerja yang mengurus rumah. Hal ini juga mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Namun, kembali lagi kepada keseimbangan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di kota Binjai. Yang mengakibatkan angkatan kerja yang mencari pekerjaan dan menambah jumlah angka pengangguran di kota Binjai.

Selain penambahan angkatan penduduk, kebijakan pemerintah dalam perekonomian seperti kebijakan upah minimum daerah, kebijakan penetapan pajak, pemerataan pendapatan, tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi besarnya pendapatan pajak.

Temuan ini berdukung dengan oleh penelitian terdahulu Norman (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh UMKM dan Pertumbuhan Kerja terhadap Penerimaan Pajak”. Secara parsial, pertumbuhan kerja tidak berpengaruh secara positif penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa Pajak tidak memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini dapat terjadi karena walaupun jumlah tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di dalam negeri terus mengalami kenaikan akan tetapi Pemerintah Pusat terus menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Serta didukung juga oleh peneliti Iswahyu Ramadhani (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi”. Secara partial, Jumlah angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kapasitas pajak PPh Pasal 21. Tanda negatif pada koefisien variabel angkatan kerja bukan berarti memberikan pengaruh negatif terhadap kapasitas pajak PPh pasal 21, tetapi menunjukkan adanya kemungkinan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja tidak diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak PPh Pasal 21.

4.5 Pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai

Hipotesis terakhir dalam penelitian ini yaitu pengaruh Jumlah Pemotong Pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai. Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan uji F, dimana F hitung sebesar 95,6. Jika dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,77 pada taraf signifikan 5%, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($95,6 > 2,77$), sehingga nilai tersebut signifikan.

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka disimpulkan bahwa Jumlah Pemotong Pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai. Terdapatnya pengaruh

secara bersama-sama antara Jumlah Pemotong Pajak, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Angkatan Kerja, dan Jumlah Penduduk terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan di KPP Pratama Binjai mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk, investasi dan inflasi yang merupakan roda penggerak pada kegiatan perekonomian.

Kegiatan ekonomi sendiri di kota Binjai sendiri lumayan tertata rapi. Di mana daerah perdagangan dan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan berpusat di wilayah Pusat Kota. Sektor perdagangan dan jasa memberikan kontribusi paling besar dalam bidang perekonomian kota Binjai dibandingkan sektor lain.

Kawasan perindustrian terletak di daerah Binjai Utara dan menjadi penyumbang kedua dalam roda perekonomian kota Binjai. Industri di kota Binjai sendiri masih tumbuh positif seperti industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, serta konstruksi.

Sedangkan bagian timur dan selatan sendiri merupakan daerah pertanian. Kota Binjai sendiri masih dikenal dengan pertaniannya dimana perkebunan rambutan yang luas di kota Binjai. Perkebunan rambutan sendiri mampu menghasilkan kapasitas lebih dari 1000 ton per tahun.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Purwiyanto dan Tity Hernawati (2002: 71), dimana tinggi rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan makro ekonomi seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah

penduduk, investasi, dan angkatan kerja. Hal ini terjadi karena variabel-variabel tersebut selain menjadi asumsi penting dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi termasuk sektor penerimaan perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas kegiatan perekonomian.

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan secara lebih luas besarnya potensi pajak di suatu daerah ditentukan oleh faktor seperti tingkat pendapatan riil per kapita, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan riil penduduk, kekokohan dari sektor-sektor perindustrian dalam perekonomian, keandalan dari jenis ekonomi yang berlangsung serta kemampuan kelembagaan dan aparat administrasi, khususnya dalam lembaga birokrasi pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah Pemotong Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan PPh 21 Badan. Bertambahnya jumlah pemotong pajak di Kota Binjai tidak mendukung adanya pertambahan penerimaan PPh 21 karena kembali kepada kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar kewajiban perpajakan terutama pada penyeteroran pajak yang telah dipotong dan dipungut.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. Terdapatnya pengaruh antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan PPh pasal 21 mengindikasikan bahwa jumlah penerimaan PPh pasal 21 dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini dapat terjadi karena apabila pertumbuhan daerah tinggi maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Tingginya nilai
3. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. Terdapatnya pengaruh antara penduduk terhadap penerimaan PPh 21 mengindikasikan bahwasanya penerimaan pajak penghasilan dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk Kota Binjai.

Dengan adanya pertumbuhan penduduk maka akan terjadi kenaikan konsumsi yang mengindikasikan juga bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

4. Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 21 Badan. Apabila tenaga kerja mengalami peningkatan maka penerimaan PPh 21 juga akan mengalami penurunan. Kecendrungan hubungan negatif ini dapat diakibatkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia.
5. Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Penerimaan PPh 21 Badan. Tinggi rendahnya penerimaan pajak berkaitan dengan makro ekonomi seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk, investasi, dan angkatan kerja. Hal ini terjadi karena variabel-variabel tersebut selain menjadi asumsi penting dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi serta sektor penerimaan perpajakan juga mempunyai pengaruh terhadap aktivitas kegiatan perekonomian.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah, dalam usaha mencapai target penerimaan Pajak terutama pada PPh Pasal 21 Badan di Kota Binjai, hendaknya memperhatikan faktor-faktor ekonomi Makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Pemotong pajak badan. Karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak terutama penerimaan PPh pasal 21

Badan. Dengan adanya pertambahan jumlah wajib pajak badan maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi peneliti, terutama mengenai topik ekonomi makro dan penerimaan pajak PPh 21 Badan, sebaiknya menambahkan indikator ekonomi makro yang berhubungan langsung dengan penerimaan pajak khususnya PPh 21 Badan seperti pengangguran, tingkat investasi dan kemiskinan.
3. Bagi wajib pajak badan, perlu menambah pengetahuan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak atas usahanya dengan tepat waktu atau tidak menunda pembayaran pajak.
4. Bagi Dirjen Pajak, dalam hal ini khusus untuk KPP Pratama Kota Binjai terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik berupa peningkatan kualitas SDM, sehingga wajib pajak yang terserap dapat meningkat. Selain itu, sosialisasi terhadap wajib pajak harus terus diupayakan dan ditingkatkan untuk peningkatan penyerapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri & Samosir, Omas. 2011. *Dasar-dasar Demografi Edisi Revisi 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Asdora, Putri. 2014. "Pengaruh WP Badan Dan WP Orang Pribadi Terhadap Total Penerimaan Pajak Dengan Menggunakan Variabel Intervening Jumlah SPT Tahunan Badan, Jumlah SPT Masa PPN Dan Jumlah SPT Orang Pribadi", *Jurnal TEKUN*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Vol. 05 No.01, Maret 2014
- Arisandi, Yessi. 2015. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, Penertiban Surat Tagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Kota Binjai: BPS Kota Binjai. *Jurnal FEKON*. Fakultas Ekonomi Uniersitas Riau. Vol.02 No.02
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP STIE YKPN
- Badan Pusat Statistik Kota Binjai. 2020. *Data dan Infomasi Penduduk Kota Binjai*. Kota Binjai: BPS Kota Binjai
- Brotodiharjo, Santoso. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Eresco
- Devano, Sony & Siti Kurnia Rahayu. 2016 . *Perpajakan Konsep: Teori dan Isu*. Jakarta: Prinadi Media Group
- Dwi, Sunar Prasetyono. 2011. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana

- George, Denny, dkk. 2018. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Vol.19 No.16, April 2018
- Gunadi. 2016. *Akuntansai Pajak, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama*. Jakarta : PT Gramedia Wydia Sarana Indonesia
- Hariyanto dkk. 2014. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol.10, No. 01
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integnita Dinamika Press
- Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Diponegoro. Vol.3 No.1, Mei 2001
- Mankiw, N. George. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mantra, Ida Bagoes. 2012. *Demografi Umum Edisi Kedua*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Jakarta : Andi

- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada
- Mispiyanti dan Ike Nemi. 2018. Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, Dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen Dan Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.7. No. 01
- Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPh Dan Pph 21 Lengkap Dengan Undang Undang*. Yogyakarta : Andi
- Musgrave, Richard A, Peggy B. 1989. *Public Finance in Theory and Practise*. New York : Graw Hill Book Compay
- Nugroho, Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)*. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro. Semarang. Tidak Dipublikasi
- Nurmiati, & Yuliyanti. 2016. “Pelaksanaan Pelayanan Prima pada Account Representative (AR) di KPP Pratama Wonocolo Surabaya”. *Jurnal Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Vol.04 No.01, July 2018
- Panggabean, Rima Naomi. 2016. ”Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*,

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado,
Vol.1 No.3, Juni 2013

Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Ramadhani, Iswahyu. (2019). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas PPh Pasal 21 Dan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi”. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Politeknik Keuangan Negara STAN. Vol.01, No.01, Hal.151-168

Putri, Phany Ineke. 2013. “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak”. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman. Vol.06 No.02, Juni 2013

Rahayu. 2013. *Perpajakan Indonesia- Konsep dan Aspek Normal*. Jakarta: Graha Jaya

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan-Teori dan Kasus Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat

Risdayanti, Mentari. 2013. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan dalam Perpajakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Rusli, Said. 2012. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LPES

Sadono, Sukirno. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Safri, Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Sari, Dian Purnama. 2016. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di provinsi Bengkulu”. *Jurnal Akuntansi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Vol.6, No.1, Februari 2016

- Sasana, Hadi. 2012. "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia(Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen*. Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. Vol.25, No.02, April 2009
- Septiyani, Nur Khasanah. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi S1. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Tidak Dipublikasi
- Sitinjak, Norman Duma. 2014. "Pengaruh UMKM dan Pertumbuhan Kerja terhadap Penerimaan Pajak". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Universitas Merdeka Malang. Vol.6, No.1, Agustus 2014
- Soebakir, Moch. 1999. *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta : Berita Pajak
- Soematri, Rochmat. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta : Eresco
- Sommerfeld, Ray M et al. 1993. *Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Janovich, Inc
- Sonny, Sumarsono. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kasual Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak".

- Jurnal Keuangan Dan Publik*. Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Vol. 04 No.01, April 2006
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Simanjutak, Timbul & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses
- Undang-undang No.17 Tahun 2000. *Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang No.17 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Viji, M Healthy. 2013. "Causes Of Migration Of Labour In Tirunelveli District". *International Refereed Research Journal*. Vol. 04 No.01, Ghana
- Walpole, Ronald E. 1995. *Pengantar Statistika Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Lampiran A
Data Penelitian dalam Tahunan

Tahun	Penerima Pph 21	Jumlah Pemotong Pajak	PDRB	Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja
2015	147754419493	19967	31669,12	264687	125172
2016	118557786742	22381	33883,69	267901	119542
2017	115565149178	21238	36385,76	270926	122234
2018	133094663775	25212	39304,87	273892	133331
2019	139220122494	28123	36942,25	271251	128517

Lampiran B
Data Penelitian dalam Bulanan

Periode	PDRB	Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Pemotong Pajak	Penerimaan PPh 21
Jan-15	35243,38	263159	10849	1870	7948880006
Feb-15	33007,64	263441	10757	1743	5899913061
Mar-15	34168,83	263722	10670	1738	7299519513
Apr-15	38555,44	264001	10587	1837	11896218787
Mei-15	40390,88	264280	10510	1822	17126929232
Jun-15	37111,62	264557	10437	1805	9594003107
Jul-15	42205,14	264833	10369	1991	24995321711
Agt-15	39169,61	265107	10306	1964	13400066129
Sep-15	33970,31	265380	10247	1736	6588788726
Okt-15	34776,38	265652	10194	2267	7814910126
Nov-15	39577,75	265922	10145	1849	15044978139
Des-15	41401,42	266191	10101	2286	20144890956
Jan-16	32821,09	266459	10062	1860	5670255331
Feb-16	31232,04	266726	10028	1718	4443757454
Mar-16	31400,62	266991	9998	1770	4873927583
Apr-16	34571,87	267255	9974	2247	7617578314
Mei-16	34369,35	267517	9954	2304	7304168579
Jun-16	40593,51	267779	9939	2322	17651472672
Jul-16	37732,89	268039	9929	1743	10357344620
Agt-16	40795,88	268297	9923	1765	18516704885
Sep-16	31571,19	268555	9923	1875	4906334645
Okt-16	32454	268811	9927	1868	5577104136
Nov-16	38350,19	269065	9936	1786	11693842950
Des-16	41199,83	269319	9950	2017	19945295573
Jan-17	35867,79	269105	9967	1562	8282996192
Feb-17	30738,3	269376	9991	2355	3159174145
Mar-17	30900,88	269664	10019	2339	3701999611
Apr-17	36904,78	269971	10053	1737	9342714470
Mei-17	39373,81	270296	10091	2043	14736311427
Jun-17	33196,18	270639	10134	2371	5967080718
Jul-17	37524,76	271000	10182	2068	10161666867
Agt-17	39781,42	271380	10234	2117	15541711061
Sep-17	31065,46	271778	10292	1748	4428330835
Okt-17	32094,88	272194	10355	1661	5307466147
Nov-17	38144,69	272628	10422	2093	11664114680
Des-17	42004,6	273081	10494	1741	23271583025

Jan-18	37318,29	274196	10907	1882	9865193057
Feb-18	31918,32	274658	10974	2387	5138434563
Mar-18	31743,76	275111	11033	1757	5102099155
Apr-18	36490,54	275555	11082	1879	8627058401
Mei-18	40187,99	275990	11123	1597	16833980215
Jun-18	38760,42	276417	11154	2163	13118688775
Jul-18	39984,84	276834	11176	2206	15852127696
Agt-18	36697,75	277243	11188	1630	8798270078
Sep-18	36075,55	277643	11192	1786	8360039651
Okt-18	34982,89	278034	11186	1690	7826580403
Nov-18	38965,15	278416	11171	1826	13374201944
Des-18	41602,74	278789	11147	2185	20197989837
Jan-19	36283,14	279154	11113	2140	8495412747
Feb-19	33773,78	279509	11070	1485	6162815163
Mar-19	33579,25	279856	11019	1880	6134600067
Apr-19	35659,83	280194	10958	1882	8184186232
Mei-19	41803,8	280523	10887	2401	21497392043
Jun-19	37938,92	280843	10808	1805	11148144755
Jul-19	40997,99	281154	10719	1876	18974030453
Agt-19	35451,7	281457	10621	2227	8129225980
Sep-19	32636,55	281750	10514	2415	5651517547
Okt-19	33386,72	282035	10398	1851	6059743216
Nov-19	42405,42	282311	10272	1524	33202344333
Des-19	32273,44	282578	10138	2429	5446936773

Lampiran C
Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000131
	Std. Deviation	2206569465
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,099
	Negative	-,070
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Hasil uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB	,983	1,017
	Jumlah Penduduk	,662	1,510
	Jumlah Angkatan Kerja	,645	1,550
	Jumlah Pemotong Pajak	,946	1,057

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

3. Hasil uji Heteroskedasitas dengan uji Park

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,430	,669
PDRB	1,345	,184
Penduduk	,100	,921
Ang, Kerja	-,794	,431
Pemotong Pajak	-	,096
	1,692	

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh 21

4. Hasil uji Autokorelasi

a. Sebelum Cochrane Orcutt

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,935 ^a	,874	,865	2285400221,50738	2,384

a. Predictors: (Constant), Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

b. Setelah Cochrane Orcutt

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,288 ^a	,083	,016	2,07499	1,901

a. Predictors: (Constant), PDRB, Pemotong Pajak, Penduduk, Angkatan Kerja

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Lampiran D

Analisis Regresi Linier Berganda dan Koefisien Determinasi

1. Hasil analisis regresi linier berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5,993E+10	1,372E+10		-4,368	,000
PDRB	1655276,464	85138,920	,938	19,442	,000
Jumlah Penduduk	130006,332	60641,475	,126	2,144	,036
Jumlah Angkatan Kerja	-2196334,625	822333,384	-,159	-2,671	,010
Jumlah Pemotong Pajak	-937128,018	1196570,733	-,039	-,783	,437

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

2. Hasil analisis koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,935 ^a	,874	,865	2285400222

a. Predictors: (Constant), Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja

b. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

Lampiran E

Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji F (Secara Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,997E+21	4	4,993E+20	95,605	,000 ^b
	Residual	2,873E+20	55	5,223E+18		
	Total	2,285E+21	59			

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Jumlah Pemotong Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Angkatan Kerja

2. Hasil Uji t (Secara Parsial)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-4,368	,000
	PDRB	19,442	,000
	Jumlah Penduduk	2,144	,036
	Jumlah Angkatan Kerja	-2,671	,010
	Jumlah Pemotong Pajak	-,783	,437

a. Dependent Variable: Jumlah Penerimaan Pajak

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 896./II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 11 Oktober 2019 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa	: ILLAL NURHABIBAH
NPM	: 1620050031
Prog. Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis	: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN Pph PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI.
Pembimbing I	: Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak. CPA
Pembimbing II	: Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., AK., CA

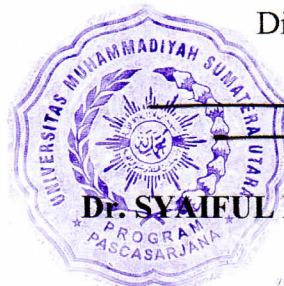
Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal **11 Oktober 2020**. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal, 21 Ramadhan 1441 H
14 Mei 2020 M

Direktur,



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Tembusan:

1. Ibu Ketua Prodi Maksi UMSU;
2. Yth. Bpk/Ibu Dosen Pembimbing I dan II;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Selasa, tgl. 16 Julii 2019 telah dilaksanakan Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. - latar belakang masalah dipertajam kembali.
- lengkapi data
- 2.
- 3.

Pembimbing I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :
Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Selasa, tgl. 16 Julii 2019 telah dilaksanakan Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. *Penyesnaian judul*

2. *Fenomena pada latar belakang*

3. *Rumusan masalah*

Pembanding,

Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Medan, _____

Pembanding,

Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP

Diketahui oleh :
Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Selasa, tgl. 16 Julii 2019 telah dilaksanakan Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

dengan catatan wajib memperbaiki:

1.

Sempurna Lani Sumbat Rasyid

2.

3.

Pembimbing II

[Signature]
Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing, selanjutnya dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah tesis.

Diketahui oleh :

Ketua,

[Signature]
Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA. Ak., CA.CPA.

Medan,

Pembimbing II

[Signature]
Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR KOLOKIUUM

Pada hari ini, Selasa, tgl. 16 Julii 2019 telah dilaksanakan Seminar Kolokium bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi / Perpajakan
Judul Proposal Tesis : PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

dengan catatan wajib memperbaiki:

Item	Komentar
Judul	Diseempurnakan.
Bab I	latar belakang masalah & pertanyaan kembali
Bab II	Teri & ditambahkan
Bab III	Teknik analisis & penyimpulan
Lainnya	
Kesimpulan	Perbaikan minor
	Perbaikan mayor ☒
	Seminar Ulang ☐

Medan, 16 Julii 2019

TIM SEMINAR

Ketua Program Studi,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing I,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Sekretaris Program Studi,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Pembimbing II

Dr. MUHYARSYAH, S.E., M.Si.

Pembanding

Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP



MAJLIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dharma No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Faks. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: ppw@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tanggal 27 Juli 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	ILLAL NURHASIBAH
NPM	1620050031
Prog. Studi/Konsentrasi	Magister Akuntansi/Perpajakan
Judul Tesis	PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Dalam latarbelakang masalah ditambahkan keterkaitan tema dengan bidang Akuntansi
2. Perbaiki kembali isi tesis sesuai masukan dari para dosen penguji
3. Sistematisa penulisan disesuaikan dengan pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana UMSU

Pembimbing I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA, Ak., CACPA

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk arahan dan Pembimbing dan Penguji pembahas untuk selanjutnya dapat diajukan disahkan pada panelis Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh
Ketua

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA, Ak., CACPA

Pembimbing I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA, Ak., CACPA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 27 Juli 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031
Prog. Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh PASAL 21 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki :

1. Kerangka konseptual penelitian disempurnakan kaitan antar variabel

2. Populasi dan sampel

3. analisis data dan pembahasan

Penguji/Pembahas II

Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh :
Ketua,

Penguji / Pembahas II

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Dr. IRFAN, S.E., M.M.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: ppa@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 27 Juli 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	ILLAL NURHABIBAH
NPM	1820050031
Prog.Studi/Konsentrasi	Magister Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis	PENGARUH KEPATUHAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORAI PRIBADI SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPH PAS 21 PADA KPP PRATAMA MEDAN BARAT

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Mempertegas sejak dari latar belakang, bahwa jenis pajak yang diteliti adalah PPh Pasal 21.
2. Menggunakan teori PPh Pasal 21 dan teori lainnya yang relevan pada tinjauan pustaka.
3. Menyempurnakan definisi operasional variabel dan pengukurannya.
4. Mempertajam pembahasan dengan menggunakan kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu.
5. Memperjelas kesimpulan dan mengkonkritkan saran.

Penguji/Pembahas I

Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan, _____

Diketahui oleh
Ketua

Penguji / Pembahas I

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Dr. BASTARI M., S.E., M.M.,BKP



FAKULTAS PENDIDIKAN, TEKNOLOGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88511104 Fax. 061 - 88511111
Website: www.umsu.ac.id www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: ppa@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 27 Juli 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: ILLAL NURHABIBAH
NPM	: 1620050031
Prog Studi/Konsentrasi	: Magister Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis	: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh PASAL 21 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

1. Pada latar belakang dijelaskan keterkaitan variable dengan Akuntansi, teori, dan keterkaitan variabel
2. Pembahasan di pertajam, dijelaskan berdasarkan hasil penelitian dan menjawab identifikasi masalah dan rumusan masalah
3. Daftar pustaka gunakan mendeley

Penguji/Pembahas III

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk arahan dari Pembimbing dan Penguji pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Diketahui oleh
Ketua,

Penguji / Pembahas III

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., CIA, Ak., CACPA.

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR HASIL

Pada hari ini, Senin, tgl. 27 Juli 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa	: ILLAL NURHABIBAH
NPM	: 1620050031
Prog. Studi/Konsentrasi	: Magister Akuntansi Perpajakan
Judul Tesis	: ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh PASAL 21 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki :

1. Perhatikan saran saran dari penguji /pembanding

2.

3.

Pembimbing II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.

Tesis ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas, untuk selanjutnya dapat disetujui didaftarkan pada panitia Ujian Tesis.

Medan,

Agustus 2020

Diketahui oleh :
Ketua,

Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Menjawab surat ini agar disebutkan
nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tanggal 4 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb :

Nama Mahasiswa : ILLAL NURHABIBAH
NPM : 1620050031
Prog.Studi/Peminatan : Magister Akuntansi /Perpajakan
Judul Tesis : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PPh PASAL 21 BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I :

Pembimbing II : Perbaiki rumus dan pengujian

Penguji I : Fokuskan latar belakang dst pada PPh Pasal 21; perbagas definisi operasional variabel, dan kesimpulan/simpulan

Penguji II :

Penguji III : Fokus hasil penelitian yg lebih terpengaruh

Berita acara ini ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/pembahas.

Medan, 4 September 2020

1. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA.

Pembimbing I

2. Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.

Pembimbing II

3. Dr. BASTARI M., S.E., M.M., BKP

Penguji I

4. Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Penguji II

5. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA.

Penguji III



Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Unit: KPP PRATAMA BINJAI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: SALOM P PANGGABEAN

NIP: 19680128 199703 1 002

Jabatan: KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPATUHAN INTERNAL

Yang ini menyatakan bahwa:

1. pada dasarnya Kami **menerima/menolak*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.
2. Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. ~~coret yang tidak diperlukan.~~

Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/
Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian (Riset)

Nama Mahasiswa/Peneliti: ILLAL NURHABIBAH

NIM/NIP/Nomor Identitas Lainnya: 1620050031

Universitas/Instansi: UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUMATERA UTARA

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi¹

Keputusan²

- ☐ Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara **Ada/Tidak Ada***)
- ☒ Kuesioner (Contoh Kuesioner **Ada/Tidak Ada***)

- ☒ Data Statistik:

Ya Tidak

Pemberian Data
Dalam Bentuk:³

Hard copy Soft copy

No.	Jenis Data ⁴
1.	Jumlah penerimaan PPh pasal 21 / bln/5th
2.	jumlah PPh Semua pph 21 mulai 2015 - 2018
3.	Jumlah pemotong pajak pph 21 / bln/5th
4.	mulai 2015 - 2019
5.	
6.	
7.	

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Ya Tidak

Catatan:⁵

Petunjuk Pengisian:

1. diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)
2. (4) diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi
3. diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).
4. diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk **hard copy** atau **soft copy**.
5. diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)

Medan, 18 - 09 - 2019



NIP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Illal Nurhabibah, anak kedua dari tiga bersaudara ini adalah putri kandung dari Bapak Ustadz Supardi dan Ibu Samidah lahir di Teratak pada tanggal 29 Oktober 1995. Dan saat ini penulis dan keluarga menetap di Batu Bara.

Penulis lahir dan dibesarkan ditengah lingkungan keluarga yang menomor satukan agama dan pendidikan, berikut riwayat pendidikan penulis :

Tahun 2000-2006 : SD Nasional

Tahun 2006-2009 : MTSs Al-Washliyah Siajam

Tahun 2009-2012 : MAN Lima Puluh dengan mengambil jurusan IPA

Tahun 2012-2016 : Penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan mengambil jurusan Akuntansi Syari'ah atau disingkat dengan FEBI. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Tahun 2016 : Penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan mengambil jurusan Magister Akuntansi sekaligus sambil bekerja di Bank BTPN Syari'ah selama 4 bulan.

Tahun 2017 : lalu penulis resign dari Bank BTPN Syari'ah dan diterima bekerja di Carnegie Campus Medan sebagai Admin Kampus Selama 1 Tahun Sambil menjalani Kuliah.

Tahun 2020 : Setelah resign dari Carnegie Campus penulis diterima bekerja di PT. Indomobil Finance cabang Lubuk Pakam sebagai admin pencairan sekaligus kasir selama 4 bulan, sampai dengan sekarang ini penulis sedang merintis sebuah usaha dan penulis berkeinginan untuk melanjutkan S3.